

# SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : APRIL 2022

**Wacana  
Presiden Tiga Periode  
Sulit Diwujudkan**

**Pembangunan  
IKN Nusantara  
Masih Jadi  
Sorotan Senator**

**SELAMA RAMADAN DAN IDULFITRI  
BAHAN POKOK  
HARUS TERKENDALI**



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

mengucapkan :

*Selamat Hari Raya*

**Idul Fitri**

**1443 H.**

*"Taqobballahuminna wa minkum,  
taqobbal ya Kariim.*

*Minal Aidin Wal Faidzin,  
mohon maaf lahir dan bathin."*



**Penasehat:**  
Rahman Hadi  
Lalu Niqman Zahir  
Sefti Ramsiaty

**Pemimpin Umum/Penanggungjawab:**  
Mahyu Darma

**Pemimpin Redaksi:**  
Taufik Jatmiko

**Redaktur Pelaksana:**  
Budi Fitra Helmi

**Redaktur Foto:**  
Yudhi Herdiana Yusak

**Sekretaris Redaksi:**  
Theresia Oktavina

**Staf Redaksi:**  
Betria Eriani, Adhelia Larasati,  
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P. Nugroho,  
Adhita Zehan, Fandi Tri Prayogo,  
Nanda Russia Rola

**Fotografer:**  
N. Nurdianto, Lela Sadiyah,  
Dimas Yulian Santoso, Haryo C. Wicaksono,  
Zaeki Adrian, Andrianto,  
Suryanto Pongsitanan, Arifin Nur Wijaya,  
Prabandaru Ega Baskoro, Fikri Muftih Akbar,  
Mujiono, Unang Gunawan,  
Ryan Nur Fajry

**Narasumber/Konsultan Media:**  
Syafuruddin AL, Syafril Amir,  
Novrizal, Arjoni Tanjung (desain grafis)

**Distribusi:**  
Bagian Pemberitaan & Media DPD RI

**KANTOR REDAKSI**  
Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1  
Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6  
Jakarta Pusat 10270  
Email : keranjang.senator@gmail.com  
Kotak Saran: majalah\_senator@dpd.go.id  
website : www.dpd.go.id  
IG : @dpdri  
FB: www.facebook.com/DPDRI  
twitter: @dpdri

## Masuki Ramadan dengan Perbaiki Skema Distribusi Pangan

**A**wal April hingga pertengahan Mei 2022 ini, umat muslim di seluruh dunia –tentu termasuk Indonesia—melaksanakan ibadah Ramadan (berpuasa selama sebulan penuh) dan kemudian disusul dengan hari kemenangan Idulfitri 1443 H. Meski rutin dilakukan, setiap tahun, namun umat Islam tetap melaksanakannya dengan penuh kekhusukkan karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan penuh keberkahan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa." [Al-Baqarah/2:183] Lepas dari bagaimana umat menjalankan ibadah ini, ada yang mengusik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Senayan, yaitu tentang keluhan warga di berbagai daerah atas langkanya minyak goreng, tingginya harga daging ayam, pasokan tempe tahu yang semakin sedikit, serta melonjaknya harga daging sapi serta tingginya harga sayuran, termasuk cabai, bawang serta jenis komoditi lainnya menjelang Ramadan.

DPD RI menilai, selain pasokan bahan kebutuhan pokok yang kurang –atau sengaja dikurangi dan/atau memang kebutuhan yang meningkat tajam--, kenaikan harga juga melambung tinggi di luar akal sehat.

Tak jelas siapa yang mengendalikan harga di pasar. Apa masih ada campur tangan pemerintah atau memang dibiarkan mekanisme pasar yang bekerja, sehingga ketika permintaan meningkat tajam, pedagang atau produsen menaikkan harga seenak perutnya.

Karena bulan Ramadan dan Idulfitri berlangsung rutin setiap tahun, apakah tidak ada penelitian atau cara bagaimana mengantisipasi itu semua? Atau memang diserahkan saja ke mekanisme pasar tadi seperti yang terjadi selama ini? Kalau iya, maka tentu akan muncul mafia tahunan atau "perangai" tahunan pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan besar dibalik rutinitas umat muslim yang hendak menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah itu.

Oleh karena itulah Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta anggota DPD RI, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi merata di seluruh daerah di Indonesia jelang dan saat memasuki Ramadan ini dengan memperbaiki skema distribusi pangan untuk mengantisipasi kerawanan. Sebab, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjadi bagian dari kedaulatan pangan bangsa. (\*)

**Pimred**



**Senat Utama**

**6**

SELAMA RAMADAN DAN IDULFITRI  
BAHAN POKOK HARUS TERKENDALI

PEMERINTAH HARUS AMBIL LANGKAH  
STRATEGIS ATASI KERAWANAN PANGAN

DIPERLUKAN KEPEKAAN PEMERINTAH ATAS  
KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA BAPOK

BULOG DIHARAPKAN BISA  
ATASI KELANGKAAN PANGAN



**Senat Kita**

**60**

Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si :  
DPD RI JALAN TEPAT UNTUK MANGABDI PADA NEGERI



**Senat Khusus**

**17**

WACANA PRESIDEN TIGA PERIODE  
SULIT DIWUJUDKAN

PRESIDEN TIGA PERIODE MUSTAHIL  
TANPA MENGUBAH KONSTITUSI

AMENDEMENT DIBUTUHKAN SETELAH  
PEMILU 2024



**Nusantara**

**28**

PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA  
MASIH JADI SOROTAN SENATOR

DPD RI SOROTI PEMBANGUNAN  
DI WILAYAH PERBATASAN

SENATOR PERTANYAKAN HILANGNYA KATA  
MADRASAH DALAM RUU SISDIKNAS

MANTAN PRESIDEN YANG WAFAT PERLU  
DIBERI GELAR PAHLAWAN NASIONAL

AUDIENSI DENGAN DPD RI:  
KSPSI MINTA UU CIPTA KERJA DIHAPUS

GUBERNUR JATIM HIBAHKAN  
TANAH BUAT KANTOR DPD RI

KETUA DPD RI TEMUI KORBAN  
PENGUSURAN TOL CISUMDAWU

KOMITE IV DPD RI : PENGELOLAAN DANA DESA  
PERLU PENDAMPINGAN BPKP



**Varia Senat**

**44**

PANSUS BLBI DALAMI DUGAAN  
REKAYASA ASET BCA

KOMITE I DAN MENDAGRI BAHAS  
PEMEKARAN PAPUA DAN PILKADA 2024

RAKER DENGAN MENDAG:  
KOMITE II SOROTI KELANGKAAN MINYAK  
GORENG

DPD RI DUKUNG RUU TPKS  
DISAHKAN JADI UU

DPD RI DUKUNG RUU TPKS  
DISAHKAN JADI UU



**Sekretariat Jenderal**

**51**

SETJEN DPD RI GANDENG BSSN  
TINGKATKAN LAYANAN SPBE

DEPUTI PERSIDANGAN:  
DPD RI AKAN MENJADI LEMBAGA  
YANG KUAT DAN ASPIRATIF

**Kajian Daerah**

**55**

PENGUATAN ASPEK PERTAHANAN DAN  
KEAMANANTERHADAP IKN NUSANTARA  
Oleh: **Reza Pratama Riansyah**

**Opini**

**58**

MENYIKAPI DEMO 1104  
Oleh: **Tamsil Linrung**  
(Anggota DPD RI)



**Galeri**

**62**



Sidang Paripurna DPD RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2021-2022 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).  
(Foto Setjen DPD RI)

# Selama Ramadan dan Idulfitri **BAHAN POKOK HARUS TERKENDALI**

Dari meja Pimpinan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diserukan kepada pemerintah untuk menjamin pasokan bahan pangan atau bahan pokok (bapok) selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1443 H/2022 M.

Seruan DPD RI tersebut cukup beralasan. Mengapa? Setiap menjelang memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, sudah menjadi masalah klasik kalau hampir semua harga barang-barang kebutuhan pokok selalu naik, seiring meningkatnya permintaan pasar.

Menjelang Ramadan kali ini, sejumlah bahan-bahan kebutuhan pokok sudah melambung harganya dan bahkan terjadi kelangkaan. Seperti minyak goreng, kedelai dan juga gula. Komoditi ini menghilang, baik di pasar tradisional maupun pasar modern.

Dengan alasan itu, DPD RI secara resmi mengimbau pemerintah untuk memberi jaminan bahwa kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat tersedia selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1443 H. Tentu dengan harga yang terjangkau.

“Menjelang memasuki bulan Ramadan, DPD RI meminta pemerintah perlu memastikan kelancaran pasokan bahan pangan pokok. Tentunya hal itu dapat menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan ibadah umat Islam selama bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 1443 H,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Masalah kelangkaan pangan ini masih menjadi isu hangat menjelang Ramadan tahun ini. Kelangkaan bahan pangan seperti minyak goreng dan gula masih menjadi permasalahan yang mengemuka di masyarakat. Termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas.

Memang sudah menjadi pemandangan yang rutin dilihat sejak beberapa waktu belakangan ini. Banyak emak-emak yang rela antre

berjam-jam hanya sekedar untuk mendapatkan satu liter minyak goreng.

Karena itu, Nono Sampono meminta pemerintah untuk mengatasi masalah ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena kebutuhan bahan-bahan kebutuhan pokok itu meningkat selama bulan Ramadan dan Idulfitri.

“Permasalahan-permasalahan bahan kebutuhan pokok tentunya perlu diurai lebih lanjut dengan melihat rantai pasok dari hulu ke hilir, di mana yang bermasalah. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, dan masyarakat tidak boleh dirugikan,” kata senator dari Maluku itu.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang diprediksi mengalami kenaikan menjelang Ramadan 1443 H.

Karena menurut LaNyalla, sudah bukan rahasia lagi jika menjelang Ramadan harga-harga bahan kebutuhan pokok biasanya merangkak naik. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang kondisi ekonominya saat ini belum stabil karena dampak pandemi

Covid-19.

“Juga bukan hanya ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok saja, tapi masalah stabilitas harga sangat penting,” kata senator dari Jawa Timur itu dalam keterangannya resminya, di Jakarta, Kamis (17/03/2022).

LaNyalla menyebutkan sejumlah bahan pokok yang mengalami kelangkaan dan harga yang tinggi. Selain minyak goreng yang mengalami kelangkaan, juga ditemukan di lapangan, harga gula konsumsi yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Selain harga yang terjangkau, ketersediaan gula pasir juga harus dipastikan pemerintah. Karena, kebutuhan akan gula pasir cukup besar, mencapai 680.000 ton,” kata LaNyalla.

Jika mendapati harga gula di pasaran tidak sesuai HET, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meminta masyarakat melaporkan, agar segera diantisipasi.

“Kita tidak boleh memanfaatkan momen Ramadan untuk mengambil keuntungan pribadi yang terlalu besar. Terlebih, dalam kondisi seperti pandemi Covid-19 ini,” katanya. (\*)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

# Pemerintah Harus Ambil Langkah Strategis Atasi Kerawanan Pangan

Pemerintah harus serius memperhatikan kelangkaan bahan pangan atau kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1443 H. Jangan sampai terjadi merata di semua wilayah di Indonesia.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika meninjau salah satu pasar di Surabaya beberapa waktu lalu (Foto Setjen DPD RI)

**D**i sejumlah daerah sudah mulai terjadi krisis pangan. Hal ini harus segera diatasi. Jangan sampai rakyat semakin menderita. Apalagi, menjelang dan selama Ramadan dan Idulfitri, biasanya

permintaan pasar terhadap kebutuhan pangan cukup tinggi.

“Jangan terlambat dan *slow respon*, karena fenomena ini terjadi tahunan. Tetapi untuk saat ini menjadi lebih serius karena sejumlah bahan pokok naik harga

dan langka di pasaran,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti baru-baru ini.

Dikhawatirkan, tingginya harga bahan pokok tentu sangat membebani masyarakat. Sebab,

sejak terdampak pandemi Covid-19, masyarakat masih berjuang keras agar ekonomi domestik dapat bergerak.

Keluhan warga di berbagai daerah terhadap langkanya minyak goreng, tingginya harga daging ayam, pasokan tempe tahu yang semakin sedikit, serta melonjaknya harga daging sapi serta tingginya harga sayuran, termasuk cabai, bawang serta jenis komoditi lainnya menjelang Ramadan harus direspon dengan cepat oleh pemerintah.

Anggota DPD RI dari Jawa Timur itu mengkhawatirkan, selain pasokan pangan yang kurang, kenaikan harga juga melambung di luar akal sehat. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi merata di seluruh daerah di Indonesia.

“Saya meminta pemerintah segera memperbaiki skema distribusi pangan untuk mengantisipasi kerawanan. Sebab sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjadi bagian dari kedaulatan pangan bangsa,” ucap LaNyalla.

## Efek Domino

LaNyalla mengkhawatirkan, kelangkaan pangan seperti minyak goreng dan gula pasir akan menimbulkan efek domino jika tidak segera diselesaikan. Dampak yang paling serius adalah tidak terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat.

Problematika pangan berdampak pada masalah lain, seperti kesehatan, kekurangan



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara Panen Raya di Weekelosawa, Sumba Barat Daya, beberapa waktu lalu. (Foto: Humas DPD RI)

gizi, kecerdasan, kinerja dan juga penurunan IPM. Jadi tidak tercukupinya pangan berdampak pada berbagai aspek dan ini sangat membahayakan.

Lambannya penanganan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, harus dijawab dengan kesungguhan kebijakan teknis dari Badan Pangan Nasional untuk memastikan distribusi pangan terjamin agar masyarakat tenang.

“Saat ini yang diperlukan masyarakat bukan hanya minyak goreng, tetapi hampir semua komoditi bahan pangan pokok yang mulai menghilang di pasaran dan terjadi lonjakan harga yang tidak rasional,” ujar LaNyalla, Minggu (13/3/2022).

LaNyalla menilai hal tersebut akan menjadi bumerang bagi pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, akan banyak keluarga yang terdampak. Sementara pemerintah tidak lagi mengeluarkan bantuan sosial (bansos). Jadi masyarakat kini kesulitan dalam mengelola pengeluaran sehari-hari.

LaNyalla meminta agar pemerintah jangan terus berwacana dalam menyelesaikan permasalahan kelangkaan pangan ini. Karena masalah pangan merupakan masalah pokok. Jangan sampai negara tidak hadir saat masyarakat kekurangan makan.

“Saya meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi hal tersebut agar stabilitas harga dapat ditekan dan masyarakat tak kekurangan kebutuhan bahan pangan. Segera putuskan solusinya. Kebutuhan masyarakat tak dapat dipenuhi hanya dengan wacana,” tegas LaNyalla. (\*)



Sejumlah warga dan pedagang mengantre membeli minyak goreng murah di Pasar Kramat Jati, Jakarta. (Foto: Istimewa)

## Diperlukan Kepekaan Pemerintah atas Kelangkaan dan Kenaikan Harga Bapok

Pemerintah harus peka terhadap berbagai keluhan masyarakat tentang kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok (bapok). Apalagi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1443 H/2022 M.

**K**elangkaan dan kenaikan harga sejumlah bahan pokok sangat menyulitkan masyarakat. Kelangkaan minyak goreng harus menjadi perhatian bersama sebab beberapa

sektor ekonomi lain juga turut terimbas adanya kondisi itu.

“Kami melihat langsung di lapangan bahwa benar mereka merasa kesulitan dan mengeluhkan mahalnnya harga kebutuhan pokok,

seperti kedelai, lombok (cabai), daging, dan yang paling gaduh adalah minyak goreng,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri, Jumat (11/3/2022).



Anggota DPD RI Kalatara Hasan Basri.  
(Foto: Setjen DPD RI)

Berbagai solusi bisa dibahas secara bersama. Terpenting harus gerak cepat. Jangan suruh masyarakat menunggu terlalu lama untuk menemukan solusi. Dapur masyarakat harus *ngebul*, terlebih kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Idulfitri.

Hasan Basri menyebut, ada tiga hal yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mengurai persoalan kebutuhan pokok dalam negeri. Pertama, mengenakan pajak ekspor minyak goreng. Kedua, relaksasi kewajiban produsen dan ketiga, operasi pasar.

"Pajak ekspor minyak goreng perlu dikenakan. Sebab, harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya di harga \$ 1.100 menjadi \$ 1.340. Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat mengenakan pajak ekspor minyak goreng sampai harga-harga kebutuhan pokok stabil," kata



Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris.  
(Foto: Setjen DPD RI)

senator dari Kalimantan Utara itu.

Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diperolehnya, saat ini pemerintah mengalokasikan biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter dengan perkiraan dana pembiayaan biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp35,41 triliun.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Fahira Idris juga meminta pemerintah lebih cepat dan sigap menormalkan kembali ketersediaan dan harga minyak goreng seperti sedia kala karena akan masuk bulan Ramadhan yang biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok, salah satunya minyak goreng.

Harus ada terobosan dari pemerintah. Dua kebijakan pemerintah, yaitu *domestic mandatory obligation* (DMO) *domestic price obligation* (DPO) yang semula menjadi solusi yang tepat menormalkan

kembali minyak goreng, ternyata tidak mampu menuntaskan persoalan minyak goreng sehingga masyarakat belum bisa bernafas lega.

Artinya di lapangan ada hambatan serius sehingga dua kebijakan ini tidak efektif. Pemerintah dengan kewenangan yang besar harusnya bisa cepat memberantas hambatan ini. Jangan sampai hingga nanti masuk Ramadan persoalan minyak goreng ini belum juga selesai.

"Kita semua tahu akibat tingginya permintaan biasanya harga berbagai kebutuhan pokok jelang ramadan naik. Jika persoalan minyak goreng ini tidak cepat diselesaikan atau dibuat normal kembali, sungguh akan membebani masyarakat. Ada jutaan UMKM yang mengandalkan minyak goreng untuk memproduksi produknya, jangan sampai usaha mereka terhambat," ujar Fahira Idris.

Fahira Idris meyakini Pemerintah mempunyai kemampuan dan kewenangan yang optimal serta sudah mengetahui persoalan utama kenapa persoalan minyak goreng ini masih terus berlarut. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian dan kecepatan bertindak memutus lingkaran yang membuat masyarakat sulit mengakses minyak goreng sesuai HET.

Jangan sampai rakyat berpikir pemerintah tidak berdaya menyelesaikan persoalan minyak goreng yang sudah berlarut-larut ini. Dia masih meyakini Pemerintah mempunyai kemampuan yang optimal menyelesaikan persoalan ini.

"Hanya saja butuh kecepatan yang optimal untuk memutus rantai yang membuat minyak goreng sulit diakses. Saya berharap sebelum Ramadan persoalan minyak goreng ini bisa tuntas dan kembali normal seperti sedia kala," harapnya. (\*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir secara virtual dalam diskusi publik bertema "Antisipasi Kenaikan Bahan Pokok Penting Menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 1443 H, Senin (21/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

# Bulog Diharapkan Bisa Atasi Kelangkaan Pangan

Badan Urusan Logistik (Bulog) diharapkan menjelma menjadi Indonesia Trade Company (ITC). Dengan posisi tersebut, tugas Bulog sebagai pengatur tata niaga komoditas pangan di Indonesia sekaligus mengantisipasi kelangkaan.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi *keynote speaker* dalam Diskusi Publik Indonesia *Consumer Club* dengan tema "Antisipasi Kenaikan Bahan Pokok Penting Menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 1443 H, Senin (21/3/2022).

"Kita masih menghadapi masalah yang sama, yaitu kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok atau sembako setiap menjelang Ramadan dan Idulfitri. Belakangan ini kita juga disibukkan dengan urusan hilangnya minyak goreng di pasaran. Sebelumnya sudah ada persoalan cabai rawit, kedelai, dan lainnya," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, negara seharusnya hadir sesuai pemikiran para pendiri bangsa yang termaktub pada Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Di situ tertulis jelas bahwa yang dimaksud dengan perekonomian disusun atas usaha bersama atas dasar kekeluargaan adalah ekonomi dari semua untuk semua. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan pondasi sistem perekonomian nasional. Di mana sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya

tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Diuraikan LaNyalla, kata yang dipakai dalam penjelasan adalah 'disusun', bukan 'tersusun'. Karena kedua kata itu berbeda makna. Disusun artinya didesain dengan *beleid* aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas. Sementara kata tersusun berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya, atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar.

"Faktanya hari ini negara menyerahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga rantai distribusi menjadi panjang, dan tengkulak tetap saja mengambil untung. Belum lagi pemain impor komoditas yang kita tahu orangnya itu-itu saja. Ditambah dengan komoditas tersebut diatur melalui harga pasar internasional," kata LaNyalla.

LaNyalla mencontohkan kedelai yang masuk dalam salah satu komoditi yang diperdagangkan di bursa komoditi Chicago Board of Trade (CBOT). Sehingga otomatis harga akan tergantung pasar, sesuai *demand and supply*.

Karena sistem ini dibiarkan tersusun dengan sendirinya, maka pemerintah tidak bisa mengintervensi harga pasar. Yang bisa dilakukan hanya dengan mengatur tata niaga impor kedelai itu. Agar produksi petani tidak jadi korban harga pasar. Minimal ongkos produksi bisa kembali. Tapi itu tidak mudah.

Pemerintah kesulitan mengatur tata niaga, karena

sudah sebegitu kokohnya mekanisme pasar, yang karena dibiarkan tersusun tadi. Bukan disusun oleh negara. Padahal permintaan kedelai begitu besar, baik untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak dan industri lainnya. Namun produksi nasional tidak pernah bisa mencukupi. Yang jadi pertanyaan lagi, mengapa tidak ada upaya serius pemerintah membenahi?

"Terus terang saja, ini menyangkut uang puluhan triliun setahun dari impor. *Fee* yang tidak kecil. Katakanlah 20 dollar per ton. Tinggal hitung saja, kalau kebutuhan 2 juta ton, berapa uang yang mengalir ke lingkaran mereka yang terlibat. Itu baru dari satu komoditas kedelai. Bagaimana dengan 9 komoditas lainnya?" tanya LaNyalla.

Oleh karena itulah, untuk membenahi persoalan tersebut, Bulog harus diberi peran besar sebagai perusahaan negara yang mendapat tugas suci dan dibekali senjata yang cukup untuk melaksanakan perannya. Bukan malah sebaliknya, diminta untuk menyerap produk dalam negeri, tetapi di sisi lain harus hidup sebagai sebuah sektor privat yang harus menghasilkan deviden.

"Bulog harus bisa menghapus pemain-pemain rente impor dan uang *fee* yang mengalir ke elit kekuasaan. Bulog harus bisa melakukan kontrak hedging di pasar future komoditas pangan agar kita terhindar dari kerugian akibat kenaikan harga di pasar dunia," ucapnya.(\*)

## Raker dengan Komite II DPD RI: Mendag Jamin Bahan Pokok Selama Ramadan dan Idulfitri

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjamin stok bahan pokok untuk bulan Ramadan dan Lebaran 2022. Dengan begitu, harga bahan pokok akan semakin terjangkau oleh masyarakat.

**H**al ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (21/3/2022). Mendag sendiri hadir secara virtual dalam rapat kerja tersebut.

"Kemendag memastikan pasokan barang kebu-

tuhan pokok terutama untuk kebutuhan dan stoknya cukup. Kecukupan stok tersebut diharapkan harga barang kebutuhan pokok tersebut menjadi terjangkau," ujar Mendag.

Berdasarkan data yang disampaikannya, pasokan indikatif bahan pokok di pelaku usaha pangan/pasar



Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Senin (21/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

induk untuk komoditas beras tercatat sebesar 851,41 ton dengan kebutuhan sebesar 80 ribu ton/bulan. Sehingga ini cukup untuk 10 bulan ke depan. Sementara stok indikatif gula pasir tercatat sebesar 504,81 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 260 ribu ton/bulan sehingga pasokan aman untuk dua bulan ke depan.

Kemendag akan memastikan terjadi kesinambungan gula yang dihasilkan petani Indonesia untuk mendapatkan hak tukar petani yang lebih baik dan pada saat yang bersamaan stok gula aman.

Begitu juga dengan stok indikatif minyak goreng, tercatat sebesar 628,8 ribu ton dengan kebutuhan 422 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 1,5 bulan ke depan. Sedangkan tepung terigu stok indikatif tercatat sebesar 991,26 ribu ton dengan kebutuhan 550 ribu ton/bulan sehingga aman untuk 1,8 bulan ke depan. Untuk kedelai, stok indikatif tercatat sebesar 280 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 200 ribu ton/bulan, cukup untuk 1,4 bulan ke depan.

Daging sapi/kerbau stok indikatif tercatat sebesar 35,43 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 32,14 ribu ton sehingga cukup hingga 1,1 bulan ke depan. Jumlah stok ini akan ditambah pasokan daging kerbau India

dalam waktu dekat.

Sementara stok indikatif untuk daging ayam ras tercatat sebesar 353,40 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 266 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 1,3 bulan ke depan. Sedangkan stok indikatif telur ayam ras sebesar 434,76 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 403,96 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 1,1 bulan ke depan.

“Untuk daging ayam ras dan telur ayam pasokannya tidak ada masalah, pasokannya cukup. Bahkan, di pasar harganya cenderung turun,” tandas Mendag Lutfi.

Kemudian, bawang putih stok indikatif tercatat sebesar 161,48 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 40 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 4 bulan ke depan. Sementara, bawang merah stok indikatif tercatat sebesar 619,15 ton/hari dengan kebutuhan stok sebesar 605,50 ton/hari.

Untuk cabai, pasokan saat ini tercatat sebesar 366,30 ton/hari dengan pasokan normal sebesar 386 ton/hari. Artinya, pasokan masih di bawah normal sebesar 5,10 persen namun akan mulai panen pada akhir Maret ini sehingga pasokan akan semakin baik pada April mendatang. (\*)

# Mudik Lebaran 2022 Momentum Kebangkitan Ekonomi Nasional



Suasana mudik di salah satu pintu tol. (Foto: Ist)

Pemerintah telah membolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini meski dengan syarat tertentu. Dengan diperbolehkannya mudik tersebut, diharapkan akan menjadi momentum kebangkitan perekonomian nasional.

**S**udah dua kali Lebaran, masyarakat tidak bisa melakukan mudik karena pandemi Covid-19. Karena alasan mencegah penularan Covid-19, pemerintah tidak mengizinkan ma-

sarakat untuk melakukan mudik saat Lebaran.

Beda dengan Lebaran tahun ini. Beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan 1443 H, pemerintah telah mengumumkan

bahwa masyarakat sudah diperbolehkan mudik saat Lebaran nanti dengan persyaratan vaksinasi dan tes antigen atau tes PCR.

Bagi yang sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster bisa langsung melenggang pulang mudik. Bagi yang baru vaksinasi dosis pertama dan kedua, mereka diharuskan untuk melakukan tes Covid-19, yaitu tes Antigen atau PCR.

Terlepas dari berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah itu, Ketua Dewan Perwakilan Da-



Pintu tol Palimanan. (Foto: Ist)

erah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut.

LaNyalla optimis mudik Lebaran 2022 akan menjadi momentum kebangkitan perekonomian nasional karena sudah dua kali Lebaran masyarakat tidak bisa mudik. Mobilitas mudik tahun ini sangat tinggi, diperkirakan mencapai 80 juta orang.

“Sebab, sudah dua tahun masyarakat banyak yang tidak pulang kampung. Tentu saja mudik tahun ini sangat berpotensi menjadi roda penggerak ekonomi. Kita berharap Idulfitri menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi dan juga kebangkitan kita bersama dalam mewujudkan kehidupan yang kembali normal,” kata LaNyalla, Kamis (24/3/2022).

Kendati demikian, LaNyalla tetap mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk tetap perlu melindungi diri dari segala kemungkinan yang terburuk terpapar Covid-19, yaitu tetap menjaga diri dan mengikuti cara hidup sehat serta menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

“Tetap patuhi protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Jangan sampai momentum bahgia Idulfitri justru menjadi bencana bagi kita semua. Jangan sampai kita lalai dan abai sehingga terpapar Covid-19 yang pada akhirnya menghambat aktivitas kita,” kata senator dari Jawa Timur itu.

Kepada pemangku kepentingan diminta untuk segera menerbitkan petunjuk teknis penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2022 agar menjadi pedoman bagi

masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri hal apa saja yang perlu mereka persiapkan.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang sudah memperbolehkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini dengan aturan vaksinasi.

Hanya saja, Sultan mengharapkan dari pemerintah untuk tidak mensyaratkan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Aturan tersebut dinilainya cukup memberatkan karena masih rendahnya persentase jangkauan vaksin booster saat ini di tengah masyarakat, hanya baru mencapai kurang lebih 8,46 persen.

“Kami harap pemerintah mempertimbangkan kembali aturan mudik lebaran tersebut karena akan banyak masyarakat yang harus menunda agenda mudiknya yang disebabkan belum mendapatkan vaksinasi booster,” kata Sultan, Rabu (23/3/2022).

Ditekankan senator dari Bengkulu itu, tradisi mudik yang telah dihentikan selama dua tahun memang sudah saatnya dibuka. Karena mudik itu memberikan dampak ekonomi bagi daerah dengan signifikan dan kemudian juga akan mempengaruhi tingkat kesiapan masyarakat dalam transisi endemi Covid-19.

“Untuk itu, kami menyarankan agar aturan mudik lebaran cukup dengan syarat vaksinasi kedua dan tetap memakai masker sehingga kami yakin masyarakat sudah sangat siap untuk beradaptasi dengan endemi Covid-19,” katanya.

Ia mengimbau agar masyarakat untuk aktif melakukan vaksinasi secara lengkap di lokasi-lokasi vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, potensi ledakan Covid-19 dengan varian baru dapat dicegah secara dini. (\*)



Jimly Asshiddiqie dalam Dialog Kenegaraan bertema "Penundaan Pemilu, Kemunduran atau Terobosan Demokrasi?" di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (Foto MJ)

# Wacana Presiden Tiga Periode Sulit Diwujudkan

Wacana jabatan presiden tiga periode adalah informasi yang menyesatkan dan membuat gaduh masyarakat. Karena, UUD 1945 secara tegas sudah membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.

**K**arena itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jimly Asshiddiqie meminta wacana presiden tiga periode itu dihentikan karena sulit diwujudkan. Salah satunya jalan untuk mewujudkannya harus dengan mengamendemen konstitusi.

“Ketentuan tiga periode tidak pernah ada dalam peraturan perundang-undangan di republik ini. Karena itu, wacana itu tidak mungkin terwujud,” tegas anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu, dikutip dari Aline.id.

Sebagai seorang pakar hukum tata negara, Jimly sangat paham dengan konstitusi. Menurutnya, Pasal 7 UUD 1945 perubahan pertama, yang mencantumkan bahwa presiden menjalani jabatan untuk 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan presiden hanya untuk satu kali jabatan berikutnya.

Karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, meminta semua pihak untuk menyudahi wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, maupun penundaan Pemilu 2024.

Jimly Asshiddiqie pun menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode dapat merusak demokrasi dan menjerumuskan presiden sendiri. Banyak pihak yang menilai wacana ini sebagai sesuatu yang negatif.

“Semua melihat ini negatif. Niat buruk merusak demokrasi dan menjerumuskan presiden. Partai mana yang setuju? PDI-P, Gerindra, NasDem, partai oposisi non pemerintah Demokrat dan PKS tidak setuju. Mayoritas tak mau,” ujar Jimly dikutip Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Sebagai anggota DPD RI, Jimly juga meyakini, mayoritas anggota DPD RI dipastikan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Amendemen UUD 1945, tidak mungkin dilakukan.

Sebab, menurut dia, perubahan UUD diperuntukkan bagi kepentingan besar dan jangka panjang. Dia mencontohkan, amendemen UUD untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Itu saja tidak mungkin sekarang ini. Apalagi untuk urusan kepentingan jangka pendek atau memperpanjang kepentingan sendiri. Tidak masuk akal dan tidak mungkin. Kalau dipaksakan bisa ribut.



Anggota DPD RI DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. (Foto: Ist.)

Karena itu berarti pengkhianatan kepada negara,” tegasnya.

Apabila dengan segala cara amendemen UUD 1945 dilakukan, Jimly mengingatkan potensi *impeachment* atau pemakzulan atas presiden. Jimly memberikan pandangan jika presiden mengeluarkan dekrit. Kondisi seperti itu pernah terjadi ketika Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan gara-gara dekrit. Mahkamah Agung (MA) ketika menilai itu melanggar hukum.

“Hukum itu akhirnya di tangan hakim. Jadi kalau ini nanti dibawa ke pengadilan, baik ke MK maupun MA itu pemaksaan perubahan konstitusi apalagi misalnya memaksakan dengan dekrit artinya melanggar sumpah, melanggar konstitusi,” tambah Jimly.

Jimly menyebutkan, ancaman terhadap demokrasi merupakan hal yang nyata di era sekarang. Perpanjangan tiga periode salah satunya, bukanlah satu hal yang baru. Banyak negara yang berhasil, tetapi banyak juga yang berdarah-darah dalam menerapkan tiga periode.

Ada negara yang berhasil menerapkan perpanjangan itu, tetapi banyak juga yang mempertaruhkan darah karena perpanjangan jabatan presiden tersebut. Seperti di salah satu negara yang ada di Benua Afrika memperpanjang jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

“Tapi banyak di antara yang berhasil pun itu tidak termasuk kategori demokrasi berkualitas, jadi tidak ideal itu,” kata Jimly dalam Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 bertajuk “Rekonstruksi Ketatanegaraan Indonesia” di Jakarta, Rabu (16/3/2022). (\*)

# Presiden Tiga Periode Mustahil Tanpa Mengubah Konstitusi



Anggota DPD RI Sumatera Barat Alirman Sori (Foto Setjen DPD RI)

Ruang publik semakin riuh dengan munculnya wacana jabatan presiden tiga periode yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun untuk mewujudkan presiden tiga periode itu, mustahil tanpa mengubah konstitusi.

**W**acana yang menginginkan masa jabatan presiden tiga periode diwujudkan dalam bentuk pemasangan spanduk seperti di Riau dan mungkin juga ada di tempat lain. Kemudian sekelompok kepala desa ingin

melakukan deklarasi untuk presiden tiga periode.

Anggota DPD RI Alirman Sori mengatakan, dalam demokrasi, semua aspirasi yang berkembang sah-sah saja sebagai bentuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh kon-

stitusi yang diatur dalam pasal 28E, ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

“Tetapi makna dan arti kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti berdiri sendiri. Kebebasan yang dimaksud harus memenuhi unsur keadilan yang universal, dapat diterima orang lain, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Alirman Sori, Rabu (30/3/2022).

Terkait masa jabatan presiden tiga periode, Alirman Sori menegaskan, dalam konstitusi secara tegas disebutkan hanya dua periode. Dia mengutip UUD 1945, Pasal 7, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketentuan ini sudah final mengatur jabatan presiden hanya dua periode. Wacana tiga periode masa jabatan presiden, tidak ada tempat dan ruang, kecuali dengan mengubah UUD 1945, ketentuan pasal 7. Tanpa mengubah konstitusi, mustahil otomatis bisa menjadi tiga periode.

Sebagai bangsa dan negara (Indonesia) sudah berketetapan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum seperti tertuang Pasal 1, ayat 3, UUD 1945. Maka segala tindakan dan perbuatan warga negara harus berdasarkan hukum negara, bukan hukum kekuasaan.

“Jika ada orang yang mengatasnamakan rakyat atau negara dan perbuatannya bertentangan dengan hukum negara dapat dihukum sesuai hukum negara. Jadi, tidak ada celah bagi setiap warga negara yang melakukan tindakan melawan hukum negara, bisa dengan bebas melakukan berbagai keinginan atas dasar kebebasan,” kata senator dari Sumbar itu.

Kembali ke soal aspirasi yang disuarakan kelompok warga negara untuk masa jabatan presiden tiga periode, Also, begitu dia akrab disapa, mengingatkan jangan mengambil langkah-langkah yang

bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi tempuh jalan benar dan lurus yang konstitusional dengan menyampaikan aspirasi menurut jalurnya ke parlemen.

Aksi melakukan pasang spanduk dan deklarasi tidak bisa mengubah situasi, tetapi boleh-boleh saja sebagai awal bentuk mengeluarkan pendapat. Demokrasi Pancasila telah memberikan ruang yang besar kepada setiap warga negara untuk melakukan permusyawaratan yang harus dilalui dengan mekanisme dan tata cara yang telah diatur, bukan dengan cara yang di luar mekanisme.

Yang perlu diingat kata Also adalah Indonesia punya “*story*” soal pergantian rezim yang berkuasa. Tidak ada artinya prestasi yang diraih, apabila di akhir masa kepemimpinan meninggalkan “*bad story*”.

“Untuk itu, semua kita berkewajiban mengawal perjalanan bangsa ini sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegara. Jangan korbankan negara untuk kepentingan sesaat. Akhir pertanggungjawaban bukan dunia, tetapi pertanggungjawaban yang hakiki adalah di akhirat, karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, istigfar untuk keselamatan,” ajak Alirman Sori. (\*)

# Amendemen Dibutuhkan Setelah Pemilu 2024

Amendemen konstitusi merupakan salah satu agenda strategis yang *urgent* untuk dilakukan. Namun bukan waktu yang tepat dilakukan saat ini, terutama menjelang Pemilu 2024, di tengah wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode.

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin mengaku sangat menghormati usulan beberapa pihak yang men-



Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (Foto Setjen DPD RI)

dorong agar dilakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di tengah konstelasi politik nasional saat ini.

“Secara politik, semuanya sah-sah saja. Apalagi jika itu didukung oleh mayoritas rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan politik negara ini,” kata Sultan, Jum’at (11/3/2022).

Menurut senator dari Bengkulu itu, amendemen konstitusi merupakan salah satu agenda strategis yang *urgent* untuk dilakukan. Amendemen penting

untuk diperbaharui, terutama dalam konteks struktur kelembagaan dan sistem ketatanegaraan.

“Saya pastikan semua pemikir dan intelektual politik, juga semua fraksi di MPR RI tidak keberatan dengan usulan amendemen, namun tidak berarti pelaksanaannya harus dilaksanakan saat ini. Nanti pasca pemilu 2024,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Amendemen tidak harus membutuhkan alasan adanya suasana konfrontasi politik yang tajam hingga menyebabkan krisis politik dan ekonomi seperti momentum reformasi 1998. Suasana demokrasi bangsa yang kian terkoreksi akibat paradigma elit politik yang cenderung pragmatis merupakan alasan ideal bagi bangsa ini berkonsensus dan menata kembali konstitusi yang ada.

Tidak bijak jika melaksanakan pembaharuan pasal-pasal konstitusi di tengah hasrat politik elit politik tertentu untuk memperpanjang masa jabatan presiden tengah memuncak. Amendemen harus dilakukan dengan kekhususan politik kebangsaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok intelektual secara penuh.

“Sehingga DPD RI secara kelembagaan meminta agar semua pihak terkait, baik elit politik maupun masyarakat harus terlebih dahulu memiliki motivasi dan keinginan amendemen konstitusi yang luhur dalam rangka membangun kembali peradaban demokrasi Indonesia secara proporsional, berkeadilan dan menyejahterakan,” kata Sultan.

Anggota DPD Jimly Asshiddiqie juga mendukung

sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan menghentikan rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

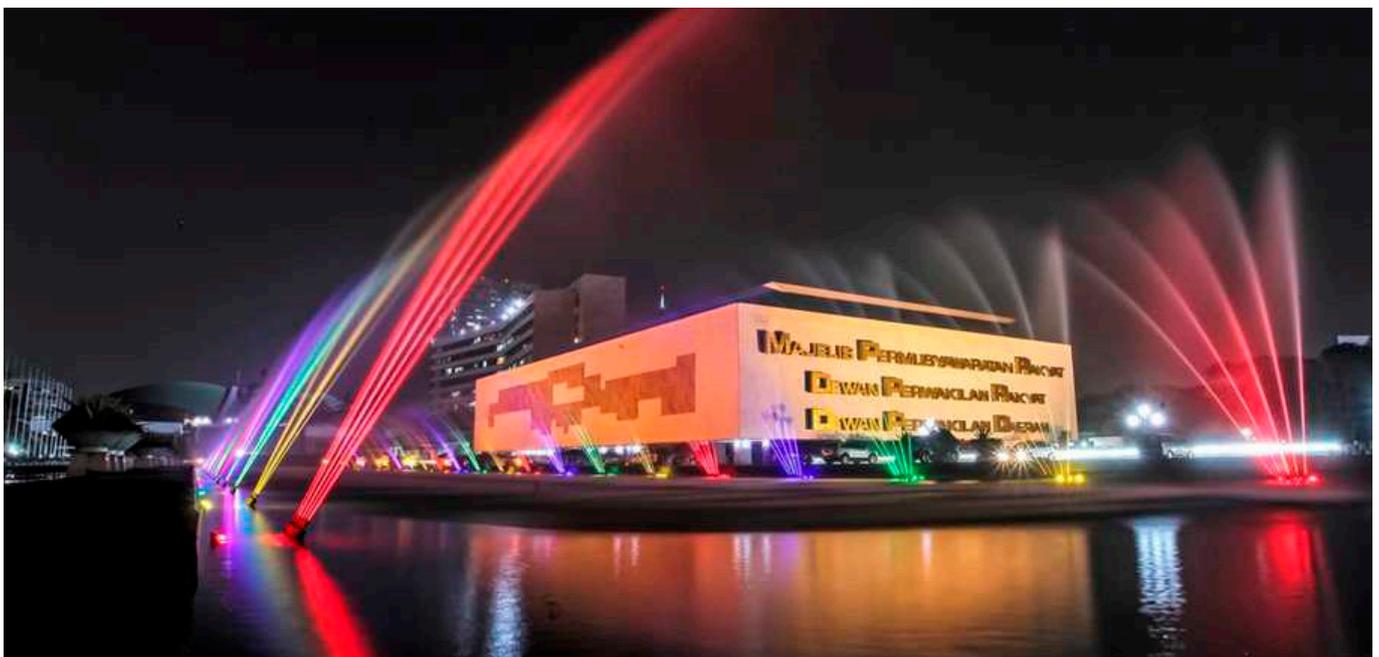
“Saya setuju, sampai 2024 tidak usah dulu ada perubahan UUD, kecuali benar-benar murni untuk tujuan penataan ketatanegaraan jangka panjang, bukan untuk kepentingan sempit menang Pemilu 2024,” ujar Jimly dikutip Tempo, Kamis (17/3/2022).

Jimly secara tegas menolak amendemen UUD 1945 jika agendanya untuk kepentingan Pemilu 2024. Lagi pula menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, sudah tidak cukup waktu membahas amendemen UUD 1945, sebab tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada tahun ini.

“Pertandingan sudah dimulai, semua pemain sudah siap di lapangan. Maka aturan pertandingan tidak boleh berubah lagi, kecuali untuk diberlakukan pada pertandingan berikutnya pada Pemilu 2029,” tuturnya.

Sebelumnya sikap resmi DPD RI adalah mendukung amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan PPHN dengan syarat kewenangan lembaga DPD RI turut diperkuat melalui amendemen.

Namun kemudian, mayoritas anggota DPD RI menolak amendemen UUD 1945 jika menyentuh Pasal 7, yang membatasi masa jabatan presiden dua periode. Usul untuk menjadikan penolakan itu sebagai sikap resmi kelembagaan mengemuka dalam Rapat Musyawarah Pimpinan DPD RI, Senin (14/3/2022). (\*)





Maket Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. (Foto: Ist.)

# Pembangunan IKN Nusantara Masih Jadi Sorotan Senator

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menjadi sorotan senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), baik dalam pembebasan lahan maupun biayanya.

**K**etua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pembangunan IKN Nusantara itu dilakukan secara transparan dan jangan sampai dalam proses pembangunannya terjadi praktik bagi-bagi kavling.

Sebab, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang khusus seperti pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan IKN, serta pengembangannya.

"Saya minta transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam pembangunan IKN ini, terutama terkait potensi bagi-bagi kavling yang pernah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata LaNyalla, Sabtu (12/3/2022).

LaNyalla juga menyoroti salah satu kewenangan khusus Kepala Otorita IKN Nusantara, yakni pem-

berian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan pembangunannya. LaNyalla berharap, kewenangan tersebut tidak membuka peluang-peluang penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak merugikan dari pemberian fasilitas tersebut.

Tidak kalah penting diingatkan LaNyalla adalah jangan sampai pemerintah melakukan pengusuran paksa lahan rakyat untuk pembangunan IKN Nusantara itu. Pemerintah perlu menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang sangat mendasar, yakni soal penguasaan lahan sebelum melakukan pembangunan.

Sebab, berdasarkan informasi yang terus berkembang, kepemilikan tanah di lokasi IKN Nusantara tersebut merupakan kepemilikan masyarakat lokal secara turun temurun. Sementara sebagian lainnya, milik para transmigran.

“Maka ini harus diselesaikan dengan baik. Saya mengingatkan, tidak boleh ada sama sekali pengusuran paksa lahan rakyat demi alasan pembangunan IKN Nusantara. Saya tak mau hal itu terjadi,” tegas senator dari Jawa Timur itu, Selasa (15/3/2022).

Jangan sampai terjadi bentrok-an antara rakyat sebagai pemilik lahan secara turun temurun dengan kepentingan elit dalam pengelolaan mega proyek IKN Nusantara itu. LaNyalla menilai persoalan lahan ini sangat fundamental. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih transparan dan serius agar tidak menuai konflik berkepanjangan.

LaNyalla juga menyoroti masalah reforma agraria. Pasalnya bukan sedikit konflik yang terjadi tentang lahan yang sudah dikuasai rakyat secara turun-temurun, namun tidak dapat dibuktikan status kepemilikannya secara hukum.

“Akhirnya dirampas perusaha-

an yang kemudian sanggup mengurus izin konsesi atau bahkan sertifikat. Ini kan tidak adil. Akhirnya rakyat dipaksa pergi dari tanah yang sudah puluhan tahun dikuasainya,” sesal LaNyalla.

Di lokasi IKN Nusantara begitu banyak tumpang tindih klaim izin konsesi perusahaan yang sebelum kedatangan megaprojek IKN baru pun sudah menimbulkan banyak konflik agraria. Secara umum, di Kalimantan Timur, penguasaan lahan pun semakin timpang antara rakyat kecil yang umumnya bertani dengan lahan yang dikuasai perusahaan tambang hingga perkebunan.

## Dukungan Terhadap IKN Menurun

LaNyalla juga menyebutkan, dukungan publik terhadap pembangunan IKN Nusantara berpotensi menurun. Potensi turunnya dukungan publik terbaca berdasarkan analitik big data yang digunakan oleh DPD RI dalam rangka menyerap aspirasi publik.

“Dari analitik big data kami, tingkat kesukaan atau antusiasme publik melalui media sosial terhadap IKN Nusantara turun menjadi 33 persen dibandingkan peman-tauan yang dilakukan pada periode Januari 2022, yang mencapai angka 48 persen,” ungkap LaNyalla, Rabu (16/3/2022).

Media sosial diramaikan oleh berbagai kritik terhadap IKN Nusantara, terkait isu lingkungan hidup, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, mahalannya harga lahan dan isu kedaulatan.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin juga menyebutkan, wacana penundaan pemilu berpotensi mempengaruhi keputusan investor dalam pembangunan IKN tersebut. Konfrontasi dan dinamika politik nasional yang cenderung

memanas hari-hari ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis calon investor asing.

“Kami khawatir, eskalasi politik nasional akan terus memanas dan menyebabkan aksi demonstrasi dalam skala besar yang mengarah pada aksi *people power* jika wacana politik ini terus dipaksakan oleh elit politik nasional,” kata senator dari Bengkulu itu, Minggu (13/3/2022).

Menurutnya, calon investor terutama investor asing akan sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan keputusan bisnisnya pada saat suasana sosial politik di suatu negara sedang tidak kondusif. Stabilitas nasional adalah prasyarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menarik lebih banyak investor asing.

“Saat ini kita sudah mendapati fakta bahwa terjadi arus keluar dana asing dari dalam negeri (*capital outflow*) dalam jumlah yang signifikan dan pembatalan investasi Softbank di IKN. Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk tidak ceroboh dalam memulai konfrontasi politik nasional dengan wacana politik yang ditentang oleh masyarakat,” tegas Sultan.

Pemerintah dimintanya lebih mawas diri dan tidak tergoda untuk merusak *mood* calon investor dengan wacana penundaan pemilu. Kita ingin pemerintah fokus dan pada agenda pembangunan IKN tanpa harus risau dengan masa depan kepemimpinan politik nasional.

Selain diakibatkan oleh situasi geopolitik global yang belum kondusif, pertimbangan investor asing tentu akan memaksa pemerintah untuk berpikir ulang dalam membangun IKN dengan mengandalkan investasi dari pihak investor. Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan IKN dengan tanpa menggerus APBN yang masih selalu defisit. (\*)

# DPD RI Soroti Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah untuk memberikan perhatian dalam pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima cendera mata dari Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Agussabati, usai membuka *focus group discussion* (FGD) di perguruan tinggi tersebut, Senin (28/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Mahyudin menilai bahwa sampai saat ini wilayah perbatasan di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat dari kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan yang masih rendah.

“Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membangun wilayah perbatasan, sekaligus untuk memperkuat ketahanan nasional kita,” kata Nono Sampono ketika membuka *focus group discussion* (FGD) di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (28/3/2022). FGD itu membahas pengelolaan wilayah perbatasan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.

Di sisi lain menurut senator dari Maluku itu, pulau terluar juga sangat rawan dengan kejahatan. Nono

Sampono menekankan pentingnya upaya penegakkan hukum dan penjagaan wilayah keamanan di perairan Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga *coast guard* yang memimpin dalam penjagaan keamanan perairan Indonesia.

“Semua negara sudah punya *coast guard*, cuma tiga negara yang belum, Timor Leste, Brunei, dan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara dengan perairan yang luas. Ke depan, kami akan melakukan revisi terbatas UU Kelautan terkait hal itu,” papar Nono.

Nono Sampono menyampaikan tentang konsepsi pengamanan dan pengawasan kegiatan di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen sebagai hak berdaulat Indonesia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional Indonesia. Sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar implementasi kepentingan nasional Indonesia di laut.

Adapun urgensi dari perubahan undang-undang sebelumnya diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas 200 mil laut, pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen Indonesia dengan negara tetangga.

“Supaya negara lain bisa mengakui hak-hak kita di laut, maka dari itu kami dari DPD RI mendorong agar RUU ini segera dapat dituntaskan oleh DPR RI menjadi UU,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta pemerintah lebih memperhatikan wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek penting dalam penegakkan pertahanan keamanan terkait kedaulatan negara. Karena selama ini wilayah perbatasan sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi,



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada acara ramah tamah dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara, di Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (28/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

Wilayah perbatasan sering masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan.

Fachrul juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan pemerintah dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan di seluruh daerah di Indonesia.

“Di wilayah perbatasan butuh sistem manajemen yang terorganisasi di pusat dan di daerah. Seharusnya ada elaborasi dari pendekatan keamanan dan kesejahteraannya,” jelasnya.

## Jangan Seperti Sipadan-Ligitan

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin juga mengingatkan Pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan. Dia tidak ingin wilayah perbatasan diklaim oleh negara tetangga, seperti kasus Sipadan-Ligitan yang akhirnya di klaim oleh Malaysia.

Dia mencontohkan wilayah-wilayah terluar di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pada kenyataannya punya banyak masalah. Rakyat di sana benar-benar teruji kesetiannya pada Indonesia. Bahkan ada jargon di sana “Ringgit di Dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di Dadaku”.

“Itu artinya betapapun rakyat di perbatasan itu begitu familiar dengan Ringgit Malaysia, bahan

makanan pun lebih murah dari sana, kesetiaan mereka tetap pada negara kita tak tergoyahkan,” kata Mahyudin pada acara ramah tamah dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara, di Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (28/3/2022).

Tapi kondisi demikian kata Mahyudin, tidak boleh diabaikan. Sangat tidak adil jika mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang banyak bergantung pada produk negara tetangga karena barang dari dalam negeri jauh lebih mahal. Masih banyak yang tidak punya listrik, dan akses transportasi maupun komunikasi yang terbatas.

Mahyudin mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat gap yang sangat besar antara warga Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan dengan tetangga mereka di Sabah dan Serawak, Malaysia.

Bukan hanya kesejahteraan, tapi juga secara psikologis berupa perlakuan dan perhatian negara. Masyarakat Krayan bahkan tak punya jalan darat yang memadai. Padahal mereka hanya terpaut 250 km dari Malinau.

Mereka juga sulit punya tanah bersertifikat karena hampir seluruh wilayah itu berstatus hutan lindung. Sementara tetangga mereka, di tanah yang sama dan berdekatan di Malaysia punya kawasan ekonomis, perkebunan kelapa sawit, bahkan pabrik *crude palm oil* (CPO).

“Bukan berarti saya menyarankan agar seluruh hutan lindung dialihfungsikan, namun kita harus melihat fakta bahwa ada rakyat Indonesia, saudara kita di sana yang butuh tempat untuk tinggal, hidup dan berusaha. Mohon agar hal ini segera menjadi prioritas bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” kata senator dari Kalimantan Timur kepada Wamen ATR/BPN Surya Candra yang turut bersama Mahyudin dalam kunjungan kerjanya itu.

Berdasarkan data yang ada, diketahui Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu kondisinya memang memprihatinkan. Mereka terisolir bahkan dari Kecamatan dan Kabupaten lain di Kalimantan Utara karena keterbatasan infrastruktur dan jalur komunikasi maupun jaringan kelistrikan.

Menurut Data Kementerian ESDM, sebanyak 306 desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik, sebagian besarnya berada di Kecamatan Krayan. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia itu baru mencapai 68,94% dimana Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan rasio desa terlistriki paling rendah (25,83%) dan rasio elektrifikasi baru mencapai 58,34%. (\*)



Ilustrasi Madrasah. (Foto: Ist.)



Hilmy Muhammad (Foto Setjen DPD RI)

## Senator Pertanyakan Hilangnya Kata Madrasah dalam RUU Sisdiknas

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003.

**R**UU Sisdiknas menuai kontroversi. Banyak tokoh yang mengkritik, utamanya karena menghilangkan penyebutan madrasah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia. Hal itu dianggap sebagai upaya peniadaan

peran madrasah selama ini.

Padahal, banyak pemangku kepentingan bidang pendidikan berharap RUU Sisdiknas sebagai pengganti UU yang ada saat ini untuk memperkuat integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Anggota DPD RI Fahira Idris meminta publik tenang dan memberi kepercayaan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memformulasikan kembali RUU Sisdiknas.

Dirinya meyakini Kemendik-

budristek memahami betul arti penting madrasah, baik secara historis, sosiologis dan filosofis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sehingga integrasinya harus semakin dikuatkan.

“Saya berharap publik tenang karena RUU ini masih draf sehingga pasti akan mendapat masukan dari para pemangku kepentingan,” kata senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu, Rabu (30/3/2022).

Dia sangat berharap, RUU Sisdiknas yang sedang disusun ini menjadi solusi agar madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional mampu mereposisi diri sesuai dengan semangat perubahan pada era globalisasi dan kemajuan teknologi ini.

Jadi madrasah bukan hanya harus dicantumkan, tetapi harus dikuatkan dalam RUU Sisdiknas agar tidak tereliminasi dari *mainstream* pendidikan nasional. Saya yakin Kemendikbudristek memahami hal ini,” ujar Fahira Idris.

Menurut Fahira, selain memformulasikan strategi baru sistem pendidikan di Indonesia secara fundamental, menjamin pemerataan akses pendidikan, menjamin mutu dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia serta menghilangkan tumpang tindih peraturan terkait pendidikan.

Isu penting RUU Sisdiknas lainnya adalah memperkuat integrasi madrasah dalam pendidikan nasional yang dianggap belum maksimal diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Ini karena madrasah satu-satunya lembaga pendidikan yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia, bahkan sebelum masa kolonial datang dan memperkenalkan sistem sekolah pada abad ke-19.

“Tidak dapat dipungkiri, madrasah bagian yang integral dari

“Apabila semangatnya adalah reunifikasi dua badan penyelenggara pendidikan dalam kerangka penyetaraan perlakuan, pembinaan dan penganggaran, maka itu ide yang bagus dan menarik.”

sistem pendidikan nasional kita sehingga mempunyai landasan kuat untuk dikembangkan dan mendapat atensi oleh negara. Jika tujuan sistem pendidikan nasional kita membuat siswa mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akademik, keterampilan untuk masuk dunia kerja, dan menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, maka madrasah harus menjadi bagian dari tujuan itu,” tukasnya.

Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad juga mengingatkan Mendikbudristek agar memperjelas tujuan penghapusan kata madrasah agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Sebab, masyarakat saat ini menafsirkan negatif penghapusan kata madrasah tersebut.

“Apabila semangatnya adalah reunifikasi dua badan penyelenggara pendidikan dalam kerangka penyetaraan perlakuan, pembinaan dan penganggaran, maka itu ide yang bagus dan menarik,” kata

Hilmy yang juga anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut.

Selama ini, menurut Gus Hilmy, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang kelulusannya dianggap setara dengan SD, SMP dan SMA, tapi masih terasa sekali seperti dianaktirikan, baik dalam hal pembinaan, penganggaran maupun peluang melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Akan tetapi bila semangatnya adalah meninggalkan madrasah semakin terbelakang, maka itu namanya tidak fair dan tidak adil. Dan itu yang justru harus kita lawan. Dan sudah terbukti dengan UU Sisdiknas 2003, yang di situ disebut madrasah, akan tetapi perlakuan-nya sama sekali jauh dari setara,” tegas Hilmy, Senin (28/3/2022).

Karena masih bersifat draf, justru memberi peluang kepada segenap komponen masyarakat, khususnya *stakeholder* pendidikan, untuk memberi masukan, kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikannya sebelum nanti menjadi UU.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, penyebutan nama sekolah maupun madrasah dianggap sama saja. Tetapi bila kurikulum madrasah sekarang ini bisa lebih diserap oleh sekolah, maka akan lebih baik. Bahkan, menurutnya, kurikulum madrasah lebih menjanjikan.

“Terus terang, struktur kurikulum di madrasah hari ini justru lebih menjanjikan anak memiliki kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh pelajar seusianya, dan juga pengetahuan moral dan keagamaan yang mencukupi. Ini berbeda dengan lulusan SD, SMP, SMA atau SMK yang dirasa sangat kurang dalam hal pendidikan moral dan keagamaannya,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut. (\*)

# Mantan Presiden yang Wafat Perlu Diberi Gelar Pahlawan Nasional



Ilustrasi Istana Merdeka. (Foto: Istimewa)

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, sudah empat orang mantan Presiden Republik Indonesia yang telah wafat atau meninggal dunia. Namun, belum satu orang pun dari mereka yang telah meninggal dunia itu diberi gelar pahlawan nasional.

Dari sejarah sejak Indonesia merdeka, negara ini telah dipimpin oleh tujuh orang putra-putri terbaik bangsa ini sebagai presiden. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terakhir yang masih menjabat saat ini adalah Joko Widodo (Jokowi).

Setiap generasi memiliki reputasi dan *legacy* yang berbeda, tergantung suasana ekonomi dan politik nasional serta tantangan geopolitik. Mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menja-

ga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita nasional, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari enam mantan Presiden RI yang pernah memimpin bangsa ini, empat orang sudah meninggal dunia. Mereka adalah Presiden RI pertama Soekarno, Soeharto, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dari mereka yang meninggal ini, belum satu pun diberi gelar pahlawan nasional.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik (DPD RI) Sultan B Najamudin mengusulkan kepada pemerintah

untuk mengangkat mantan Presiden RI yang telah meninggal dunia itu diberi gelar pahlawan nasional.

Usulan ini disampaikan Sultan dengan alasan bahwa semua mantan Presiden RI dengan segala *legacy* kebaikan dan kekurangannya merupakan sosok yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara ini.

"Para pemimpin bangsa di setiap generasi tentu memiliki reputasi dan *legacy* yang berbeda, tergantung suasana ekonomi dan politik nasional serta tantangan geopolitik. Tapi mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita nasional, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata Sultan, Jum'at (11/3/2022).

Menurut senator dari Bengkulu itu, pahlawan nasional bukan merupakan sosok yang tanpa cela



Mantan Presiden Republik Indonesia. (Foto Ist)

sosial dan politik. Mereka juga manusia biasa. Demikian pula dengan para Presiden RI. Mereka memiliki sisi lain yang harus dimaknai sebagai sebuah pelajaran berharga dalam membangun bangsa.

“Mereka adalah tokoh yang sangat dicintai dan sekaligus sangat dibenci oleh sebagian rakyatnya. Saya sangat percaya bahwa tidak ada mantan Presiden RI yang benar-benar memenuhi kriteria untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tapi mengapa kita justru memilih untuk memperdebatkan

sisi lemah para pemimpin bangsa itu, sehingga bangsa menjadi tidak adil dalam menghargai para pemimpinnya di masa lalu,” tegas Sultan.

Sultan berpandangan, demi kehormatan dan penghargaan bangsa ini terhadap jasa para pemimpin bangsa di masa lalu. Karena itu, dia mengusulkan agar setiap mantan Presiden RI yang telah berpulang kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa disematkan gelar pahlawan nasional.

“Kami ingin generasi penerus

bangsa ini memiliki kepekaan sejarah dan memberikan penghormatan yang sama kepada pemimpin kita saat ini di masa depan. Bagi kami, tidak ada pekerjaan yang paling besar dari para pemimpin bangsa ini di masa lalu kecuali memastikan persatuan dan kesatuan bangsa ini terjaga dan utuh. Kemerdekaan dan perdamaian bangsa yang kita nikmati saat ini merupakan buah kerja keras para Presiden RI di masa lalu,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (\*)

## Audiensi dengan DPD RI: KSPSI Minta UU Cipta Kerja Dihapus

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengharapkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) betul-betul mengawasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan cacat formil.

**H**arapan KSPSI disampaikan ketika pimpinan induk organisasi pekerja melakukan audiensi dengan

DPD RI, Senin (28/3/2022). Mereka diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Pansus Cipta Kerja DPD

RI Alirman Sori dan senator dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung.

Sedangkan dari KSPSI hadir Ketua Umum Jumhur Hidayat, Sekjen Arif Winardi, Wakil Sekjen KSPSI Liliek Nugroho, Wakil Sekjen Rosa Pasaribu, Wakil Sekjen Gatot Subroto, Bendahara Ahmad Yani, Nano Haryono (Ketua PP FSPKSI), Daulat K (Ketum PP FSPMI) dan beberapa pengurus lainnya.

“Kami minta Omnibus Law ini tidak jadi diterapkan. Banyak merugikan bagi para pekerja.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Pansus Cipta Kerja DPD RI Alirman Sori dan senator dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung ketika menerima audiensi pengurus KSPSI, Senin (28/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Dalam perspektif daerah, Omnibus Law ini juga sangat tidak adil bagi daerah,” ujar Jumhur Hidayat.

Sedangkan Sekjen KSPSI Arif Winardi menyebutkan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak direspons dengan baik oleh investor. Tak banyak investor dari luar negeri yang datang ke Indonesia.

Karena mereka mengetahui UU Cipta Kerja tersebut mengebiri tenaga kerja dan mendzolimi para buruh. Dia mencontoh Elon Musk, dia lebih milih melakukan investasi di India. Karena mengetahui hak pekerja di Indonesia diabaikan dengan adanya UU tersebut/

“Omnibus Law seolah-olah menawarkan buruh tanpa kehormatan oleh pemerintah. Karena itu kami berharap DPD RI berkoalisi dengan buruh agar aturan ini dihapus,” kata Arif lagi.

Selain mengenai UU Cipta Kerja, mereka juga mengeluhkan banyak masuknya barang-barang impor ke Indonesia. Semakin

banyak barang yang diimpor maka akan berdampak bagi para pekerja di Indonesia.

“Yang merasakan terpukul akibat impor ini adalah para buruh atau pekerja. Kalau semua impor, produksi akan terhenti dan tentunya berakibat tidak ada pekerjaan bagi para pekerja. Banyak kemudian terjadi PHK gara-gara impor ini Padahal Indonesia sebenarnya bisa,” kata Jumhur.

Karena itu, mereka menaruh harapan besar kepada DPD RI untuk menyuarakan aspirasinya ke pemerintah. Mereka pun beralasan, DPD RI selama ini telah bersuara lantang menyuarakan terkait masalah impor ini.

Dijelaskan oleh LaNyalla bahwa dirinya sudah mengingatkan ke pemerintah soal impor sejak Agustus 2021. Namun dirinya heran kenapa Presiden Jokowi baru marah-marah belakangan ini.

“Jauh sebelum Presiden Jokowi marah-marah soal impor ini, saya

sudah mengingatkan pemerintah agar kran impor ini dibatasi. Tetapi kemudian tetap saja angkanya tinggi,” kata LaNyalla merespons keluhan KSPSI tersebut.

Dijelaskan LaNyalla, dia mengingatkan pemerintah soal impor tersebut disampaikan ketika Sidang Bersama DPR dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu. Dalam pidatonya, LaNyalla menyampaikan bahwa *marketplace* besar itu faktanya 90 persen impor dari Tiongkok. Indonesia hanya sebagai penjual saja.

LaNyalla juga mengkhawatirkan, kalau semuanya impor, pabrik di Indonesia akan berhenti memproduksi. Tenaga kerja kemudian menganggur dan ujungnya dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Lebih jauh sebenarnya menurut LaNyalla bukan soal itu saja, ini menyangkut amanat kedaulatan, negara harus hadir supaya ada ruang, sekaligus memastikan market bagi produk lokal.

“Ini saatnya, mari bersama-sama mulai mengawasi impor negara kita. Jangan sampai semakin bertambah. Mudah mudahan dengan marah-marah Presiden Jokowi kemarin benar-benar impor semakin kecil,” ucap LaNyalla.

Soal Omnibus Law Cipta Kerja, LaNyalla mengatakan bahwa DPD RI saat ini membentuk Panitia Khusus UU Cipta Kerja. LaNyalla berharap KSPSI nantinya bisa banyak memberikan masukan.

Ketua Pansus UU Ciptaker Alirman Sori menyebutkan bahwa memang karena Omnibus Law Cipta Kerja otonomi daerah seperti mandul. Kewenangan semua ditarik ke pusat, sedangkan daerah diminta mengawasi.

UU Cipta Kerja seperti merampas otonomi daerah. Ini perlu diluruskan,” kata senator dari Sumatera Barat itu. (\*)



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghibahkan tanah hak pakai seluas 2.000 meter persegi kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Tanah tersebut akan digunakan untuk lokasi Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di provinsi tersebut. (Foto Setjen DPD RI).

## Gubernur Jatim Hibahkan Tanah Buat Kantor DPD RI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghibahkan tanah hak pakai seluas 2.000 meter persegi yang digunakan untuk lokasi Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di provinsi tersebut.

**P**enandatanganan berita acara serah terima hibah tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) kepada DPD RI itu dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Senin (7/3/2022). Pada kesempatan itu,

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi, Evi Zainal Abidin dan Adilla Azis. Hadir pula Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum Empi Muslion, Kepala Kantor DPD RI Jatim Andika

Prima Sari.

Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Pejabat Sekda Wahid Wahyudi, Kepala BPKAD Bobby Soemiarsono, Kepala BAPPEDA Mohammad Yasin, Kepala Biro Hukum Lilik Pudjiastuti, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jempin Marbun, Kepala Bakesbangpol R Heru Wahono Santoso dan Kepala Dishub Nyono.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Timur itu dalam menindaklanjuti permintaan hibah tanah DPD RI. Menurutnya, tidak salah bila banyak orang menjuluki Khofifah dengan istilah gubernur yang GPL alias gak pake lama.

"Warga Jawa Timur beruntung memiliki pemimpin yang selalu

ingat dengan yang sudah diucapkan atau yang sudah dijanjikan. Karena, masih ada pemimpin di luar sana sering lupa dengan apa yang diucapkan,” kata LaNyalla pada kesempatan itu.

Diungkapkan LaNyalla, pertama kali ia menyampaikan perihal gedung DPD RI Jatim secara lisan kepada Khofifah saat ia berkunjung ke Kantor Gubernur Jatim pada 1 November 2019. Setelah itu, DPD RI menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Khofifah.

“Hanya dalam 15 bulan, tepatnya 18 Februari 2021 lalu, langsung direalisasi oleh gubernur. Luar biasa cepat. 15 bulan, artinya belum genap 1,5 tahun dan sudah ditandatangani antara Sekda Provinsi Jawa Timur dengan Sekjen DPD RI. Bahkan sudah selesai administrasinya. Sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai,” kata senator dari Jawa Timur itu.

LaNyalla berharap Setjen DPD RI segera bisa menindaklanjuti dengan cepat juga kepada Kementrian

Keuangan terkait dengan anggaran pembangunan fisik bangunan yang memang direncanakan dari APBN.

LaNyalla berharap, Menteri Keuangan juga secepat Gubernur Jawa Timur bekerjanya. Karena seperti diketahui, anggaran pemerintah pusat sepertinya akan banyak tersedot kepada proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Sehingga beberapa kementerian dan lembaga tahun ini juga masih mengalami pemotongan *refocusing* anggaran.

Meski demikian, LaNyalla berharap, kepentingan pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di daerah tetap mendapat prioritas. Sebab tugas dan fungsi DPD RI sebagai wakil daerah sangat membutuhkan kantor di setiap ibu kota provinsi.

Apalagi sebut LaNyalla, keberadaan Kantor Perwakilan DPD RI di setiap provinsi sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD RI (MD3). Di mana pada Pasal

252 ayat (4) disebutkan, Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.

Saat ini DPD RI telah memiliki kantor perwakilan yang sudah eksisting berdiri di empat provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Sedangkan hibah dalam bentuk tanah yang sudah diterima dari pemerintah provinsi ada di 15 ibu kota provinsi. Kelima belas tanah hibah itu di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

“Jadi total sudah 19, tinggal kurang 15 provinsi lagi. Insya Allah akan terealisasi di periode kali ini,” harap LaNyalla. (\*)

## Ketua DPD RI Temui Korban Penggusuran Tol Cisumdawu

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemui masyarakat empat desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang menjadi korban pembangunan Tol Cisumdawu, Senin (21/3/2022)

**K**edatangan LaNyalla ke lokasi untuk menggali lebih jauh pembayaran lahan warga yang belum juga tuntas. Tahun lalu persoalan ini

telah difasilitasi DPD RI. LaNyalla didampingi senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media

DPD RI Mahyu Darma.

Hadir pula Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, Kapolsek Rancakalong Iptu Agus Permana serta jajaran Forkopimda Sumedang.

“Saya kira setelah kami fasilitasi pada tahun lalu, masalah ini sudah selesai. Sebab, masing-masing pihak saat itu sudah tanda tangan komitmen. Tapi ternyata masih ada masalah. Saya seperti berhutang. Makanya saya datang langsung ke sini,” kata LaNyalla kepada ratusan warga yang menjadi korban penggusuran pembangunan jalan tol tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu menyesalkan sikap Pemerintah



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi empat desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk menemui warga setempat yang korban pembangunan Tol Cisumdawu, Senin (21/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang abai melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan setahun lalu di DPD RI. Padahal pada saat di DPD RI, Pemprov Jabar hadir dan menandatangani komitmen. Namun disesalkan, komitmen pada Oktober tahun lalu itu tak dilaksanakan. Kenapa harus ditunda.

LaNyalla meminta Pemprov Jabar segera menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Ia tak mau hak rakyat terampas begitu saja. Jika Pemprov Jabar memiliki hambatan sampaikan ke dirinya.

"Kalau ada masalah di PUPR, sampaikan juga ke saya. Nanti saya panggil menterinya," tegasnya.

LaNyalla mengaku prihatin tanah warga yang dibeli sejak tahun 2008 lalu tak kunjung tuntas pembayarannya. Bahkan, sampai saat ini ada warga yang belum menerima haknya.

"Nelongso saya mendengarnya. Uang ganti kok dicicil sampai setahun. Bahkan tadi pengakuan

warga ada yang belum dibayar sampai sekarang padahal sudah jadi jalan tol," katanya.

LaNyalla meminta agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya bisa saja warga menempuh jalur hukum. Namun, LaNyalla meminta sedapat mungkin hal ini dihindari dan diselesaikan secara kekeluargaan.

"Saya yakin masyarakat mau menyelesaikan secara kekeluargaan, asal haknya dipenuhi. Kami DPD RI siap membantu. Ini tugas kami sebagai wakil daerah," kata LaNyalla disambut tepuk tangan dan pekikan "Hidup LaNyalla" dari warga yang hadir.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, berjanji segera menyelesaikan hak masyarakat yang masih tertunda. Ia memaklumi jika masyarakat menuntut haknya. Itu sebabnya ia hadir pada kesempatan ini untuk bertukar pikiran dan mencari solusi.

"Ini proyek strategis nasional. Saya yakin masyarakat pasti mendukung. Sekarang persoalannya adalah, bagaimana kita mencari solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat ini," kata Bambang.

Pada rentang waktu 2009-2010, instansinya diberikan kewenangan membebaskan lahan seluas 16,8 hektare dengan nilai ganti untung mencapai Rp20,8 miliar. Ada 291 orang warga di Desa Ciharang yang lahannya dibebaskan. Dalam hal ini sudah dilaksanakan dengan baik dan mekanismenya sudah sesuai dengan pelaksanaan.

Data lainnya, Bambang mengaku tengah mengumpulkan ulang oleh karena ia baru menjabat sebagai kepala dinas. Pihaknya sedang mencari data itu dan sudah lengkap. Langkah apa pun akan dilakukannya. Sekarang sudah diverifikasi dan disampaikan ke BPN.

Sebelumnya, tiga orang perwakilan warga dari ratusan orang yang hadir yakni Yayat, Cecep dan Yoyoh Sri Lestari menceritakan secara lengkap kronologi kasus yang bermula sejak tahun 2008.

Katanya, meski mereka tak memberikan kuasa kepada Tim Tujuh yang menganggap diri mewakili mereka, namun faktanya lahan mereka dilepaskan begitu saja oleh Tim Tujuh tersebut.

"Kami tidak pernah jual beli tanah dan bangunan dengan siapapun. Waktu BPN dan instansi lainnya membuat berkas, kami tak pernah diundang. Begitu juga saat pengukuran dan tahapan proses lainnya," kata Yayat yang diamini ratusan warga yang hadir.

Saat pemberkasan, Yayat mengisahkan warga tak diperkenankan membaca surat-surat yang mereka tandatangi. "Kami tak boleh membaca isi berkas tersebut, hanya diminta menandatangani saja. Setelah ditandatangani

langsung dirampas paksa oleh oknum BPN berkasnya,” cerita Yayat dibenarkan warga.

Setelah itu, datang Tim Tujuh memberikan cek kepada warga untuk dicairkan di bank. Dengan nada mengancam, Tim Tujuh meminta kepada warga untuk tak memprotes dan mengambil saja uangnya di bank.

“Kalau tak diambil, maka semuanya hilang. Uang hilang, tanah kami juga. Maka kami terpaksa ke bank mencairkan uang,” katanya.

Sialnya, pihak bank pun mencicil proses ganti rugi yang tak seimbang tersebut. “Kata pihak bank jangan diambil banyak-banyak nanti dirampok. Akhirnya dicicil sampai ada yang setahun,” katanya.

Yayat dan ratusan warga mengaku mendukung pembangunan jalan tol tersebut. Hanya saja, mereka tak mau dirugikan. “Kami mendukung tol ini, tapi jangan sengsarakan kami. Tanah saya seluas 822 meter hanya dibayar Rp10 juta

saja,” katanya.

Cerita Cecep lebih memilukan. Hingga kini lahannya seluas 1.600 meter belum diganti. “Pajaknya tetap ke saya. Sampai sekarang saya tetap membayarkan pajaknya. Padahal tanah saya sudah jadi jalan tol meski belum dibayar,” ujarnya.

Begitu juga dengan Yoyoh Sri Lestari tanahnya yang sudah digarap menjadi lahan tol, namun belum ada pembayaran sama sekali. “Sertifikat tanah masih sama saya,” ucapnya. (\*)

## Implementasikan PLTN DEN Minta Dukungan DPD RI

Dewan Energi Nasional (DEN) minta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

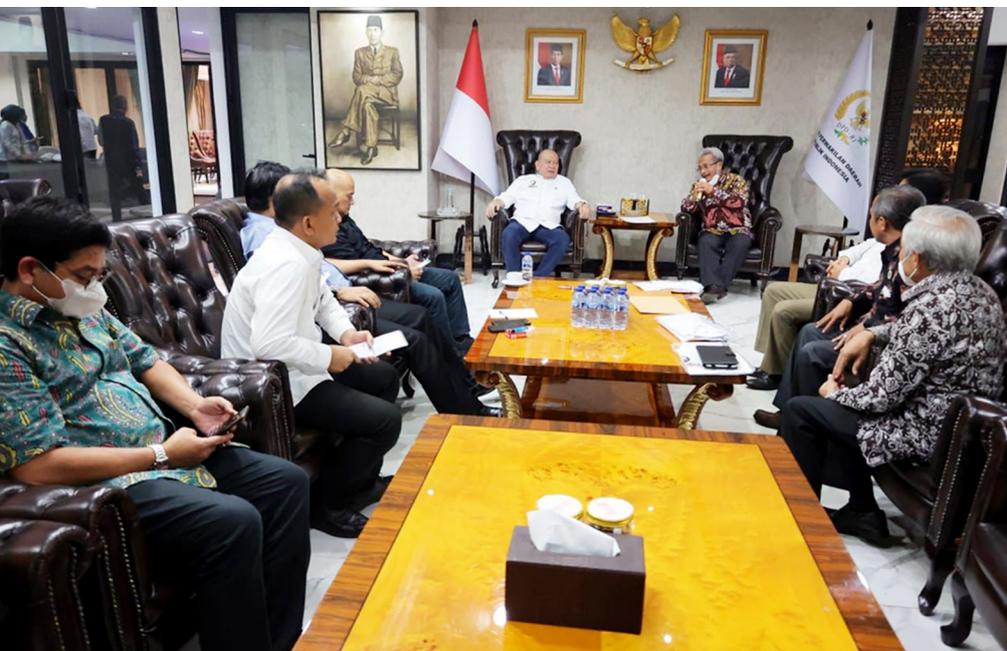
Jajaran pengurus Dewan Energi Nasional (DEN) menyambangi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022).

Hadir pada kesempatan itu anggota pemangku kepentingan yang terdiri dari Agus Puji Prasetyono, Yusra Khan, AS Natio L, Musri M, Agung W dan Chesario.

Agus Puji Prasetyono menjelaskan struktur kepengurusan Dewan Energi Nasional. Ketua umumnya adalah Presiden Jokowi, wakilnya Wapres Ma'ruf Amin, ketua harian Menteri ESDM dan anggotanya ada 7 kementerian. Sedangkan yang hadir menemui LaNyalla adalah anggota pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan itu Agus meminta dukungan DPD RI untuk mendorong energi yang kuat dan stabil untuk kebutuhan dalam negeri.

“Saat ini, untuk merealisasikan energi yang andal dan kuat itu



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima audiensi pengurus Dewan Energi Nasional (DEN), di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

agak sulit dengan adanya Paris Agreement dan Net Zero Emission," kata Agus.

Sedangkan mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Angin, Air dan Geothermal, posisinya tak terlalu kuat dan stabil untuk memasok kebutuhan nasional. PLTN adalah energi yang kuat.

Untuk membangun PLTN, dijelaskan Agus ada 19 persyaratan yang harus dipenuhi. Dari seluruh persyaratan tersebut, Indonesia telah memenuhi 17 persyaratan.

"Hanya kurang dua persyaratan, yakni organisasi untuk membangun PLTN dan deklarasi resmi dari negara, dalam hal ini Presiden Jokowi," ujarnya.

Soal organisasi yang dipersyaratkan, dalam waktu dekat Agus mengaku akan dideklarasikan organisasi bernama *Nuclear Energy Programme Implementation Organization*.

"Kami mendorong agar energi nuklir ini akan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin kita perlu percontohan agar masyarakat tahu bagaimana PLTN ini beroperasi," katanya.

Dikatakannya, nuklir merupakan pilihan yang harus dimulai karena membutuhkan waktu 5 hingga 8 tahun.

Kalau terjadi letupan itu karena seringkali karena tak paham. Maka diperlukan sosialisasi melalui lembaga negara, salah satunya adalah DPD RI.

Indonesia, kata dia memiliki sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang mumpuni untuk membangun PLTN.

"Uni Eropa sudah mendeklarasikan bahwa nuklir itu energi hijau," tegas dia.

Ketua DPD RI mendukung penuh apa yang dipaparkan Dewan Energi Nasional itu. Bahkan, jauh

hari sebelumnya, LaNyalla sebagai Ketua DPD RI telah menyatakan secara resmi bahwa Indonesia membutuhkan PLTN.

"Dalam pidato saya pada saat Sidang Bersama 16 Agustus 2021, saya sudah menyatakan bahwa upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi dan ketahanan energi maka diperlukan PLTN," tegas LaNyalla.

Bahkan, senator asal Jawa Timur itu menegaskan jika DPD RI telah meminta pendapat para ahli di bidang nuklir.

"Saya setuju dengan penggunaan energi nuklir," tutur LaNyalla.

Dahulu, LaNyalla melanjutkan, Presiden Soeharto sempat mewacanakan akan membangun PLTN di Gunung Muria. Namun saat itu Presiden Gus Dur menolak. Saya kira dengan penggunaan energi nuklir maka akan semakin murah dan efisien. (\*)

## Indonesia Butuh Ketua Kelas Keamanan Laut

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono mengharapkan revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bisa menciptakan efisiensi pada keamanan laut Indonesia.

**A**da enam kementerian dan lembaga yang memiliki kapal patroli yang bertugas dalam pengamanan di wilayah perairan Indonesia. Namun, sejauh ini seakan-akan berjalan sendiri-sendiri.

Memang diakui senator dari

Maluku itu, bahwa mereka bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, tapi secara terpadu perlu diatur agar lalu lintas bisa teratur dengan baik.

"Kita harus mencari efisiensi dalam keamanan laut kita. Sehingga Badan Keamanan Laut

(Bakamla) yang menjadi "Ketua Kelas" dalam hal ini," kata Nono Sampono dalam *fokus group discussion* (FGD) bertema 'Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dalam Undang-Undang' di Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022).

Menurut mantan Danjen Marinir itu, TNI Angkatan Laut serta armadanya saat ini masih sangat terbatas. Dalam revisi terbatas UU ini harus mengakui bahwa Indonesia *coast guard* adalah Bakamla. Selain itu harus diberikan hak untuk menyidik, dan tentunya harus di bawah presiden langsung.



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Rektor I Universitas Pertahanan Mayjen TNI Jonni Mahroza dalam fokus group discussion (FGD) bertema 'Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dalam Undang-Undang' di Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Menurut Nono Sampono sudah 50 tahun Indonesia hanya berkutik dalam penataan sistem keamanan laut Indonesia. Bahkan sampai saat ini untuk menyatukan kemaritiman Indonesia belum juga bisa diselesaikan.

"Untuk perdamaian, Bakamla bisa sebagai penegak hukum. Dalam keadaan darurat, ia juga mampu mendukung sistem pertahanan negara. Jadi ada dua dimensi, sementara kita belum punya," terang Nono Sampono.

Ketua Panitia Perancang Un-

dang-Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Br Sitepu menyebut, terdapat 24 UU yang mengatur tentang keamanan laut. Bahkan terdapat berbagai lembaga atau unit kerja yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan penegakan hukum. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya koordinasi di antara lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah perairan.

"Terdapat banyak peraturan perundangan yang materinya saling tumpang tindih dan

berbenturan. Permasalahan lainnya dalam keamanan laut dan pantai adalah banyaknya instansi yang berwenang, sehingga kurang efektif dalam keamanan laut kita," kata senator asal Sumatera Utara itu.

Wakil Rektor I Universitas Pertahanan Jonni Mahroza juga mengakui eksistensi penegakan hukum kelautan masih kurang. Untuk itu perlu pembenahan dan sinergitas lembaga terkait atas keamanan laut sehingga bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Revisi terbatas UU Kelautan diharapkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kepala Bakamla Aan Kurnia menilai bahwa kondisi saat ini ada enam kementerian/lembaga yang mempunyai armada patroli berdasarkan UU. Alhasil, kondisi saat ini seakan tumpang tindih kewenangan dalam penindakan di laut.

"Dampaknya sekarang menjadi ambiguitas penanggungjawaban keamanan maritim kita. Belum lagi pemeriksaan berulang oleh kapal patroli yang berbeda-beda," ungkapnya. (\*)

## Perlu Diperhatikan Infrastruktur di Daerah Penyangga IKN Nusantara

Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu memperhatikan tingkat kesiapan daerah penyangga. Sampai saat ini, beberapa daerah penyangga masih mengalami keterbatasan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.

Karena itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera memperhatikan perbaikan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara.

"Daerah penyangga merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari IKN. Karena itu kami meminta Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Timur dan Ka-

limantan Utara sebagai daerah penyangga,” kata Mahyudin di tengah kunjungan kerjanya di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kamis (31/3/2022).

Dalam kunjungan kerja yang disertai sejumlah senator itu, Mahyudin mengadakan rapat koordinasi pembangunan di Kaltara dan Kaltim, bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Otoritas IKN, Kepala Bappenas, Wamen PUPR, Wakil Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara serta perwakilan tokoh masyarakat adat Dayak.

“Kami perlu sampikan, beberapa daerah penyangga IKN ternyata memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang kurang bagus. Jalan dari Samarinda ke Sangatta yang dahulu bisa ditempuh 3 jam, sekarang sekitar 7 jam, karena banyak jalan rusak,” kata Mahyudin.

Keterbatasan infrastruktur jalan yang ada di daerah penyangga bahkan di sekitar IKN itu, menurut Mahyudin dikhawatirkan akan mengganggu program pemba-

ngunan IKN. Padahal, menurutnya, Dinas PUPR saat ini sedang menyusun usulan jalan nasional dan usul pembangunan pelabuhan terkait jalan ini, namun sayangnya pembangunan jalan yang berkualitas itu dianggap bukan prioritas.

Jalan-jalan di sekitar IKN pun perlu juga diperbaiki, karena selama ini truk-truk besar yang melintas dianggap sebagai penyebab rusaknya jalan karena kualitas jalan yang tidak baik. Maka dia mengusulkan jalan di Kaltim dikongkritkan saja semuanya, jangan diaspal agar tidak cepat rusak lagi dalam waktu lama.

Pada kesempatan itu, Mahyudin juga menyampaikan aspirasi kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengenai perbaikan jalan di Apau Kayan, yang dahulu menggunakan jalan PT Sumalindo, namun sekarang perusahaan itu tidak lagi beroperasi. Sehingga mereka terisolasi.

“Kebetulan saya bersama Pak Wamen sudah berkordinasi dengan PT Sumalindo, bahwa pada

prinsipnya status jalan itu bisa dialihkan ke negara, dan harusnya bisa dikerjakan oleh menteri PUPR. Nanti prosesnya suratnya harus melalui Gubernur Kaltim dan Kaltara,” katanya.

## Utamakan Produksi Dalam Negeri

Pada kesempatan yang sama, Senator Hasan Basri mendorong Kementerian PUPR untuk lebih memprioritaskan penggunaan bahan baku dari produsen dalam negeri dalam setiap pembangunan infrastruktur nasional.

“Kami mendorong Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri. Mengingat, hal ini memiliki *multiplier effect* yang sangat besar terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Hasan Basri.

Ketika industri dalam negeri diutamakan tentu akan memperluas lapangan kerja, memperkuat daya saing serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pembangunan IKN baru ini adalah momentum untuk mendorong investasi dalam negeri serta memperkuat industri nasional. Jangan sampai akhirnya dalam pembangunan nasional justru menggunakan produk-produk impor.

Tak hanya itu, senator asal Kalimantan Utara itu juga meminta kepada kementerian terkait untuk semua hal yang diputuskan terkait IKN, harus dilakukan koordinasi seluruh elemen bangsa.

Pembangunan IKN harus pula mempertimbangkan kearifan lokal, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra putri asal Kalimantan untuk duduk di jajaran eselon 1 sampai dengan eselon 3, sesuai dengan arahan Presiden RI. (\*)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah senator ketika mengunjungi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kamis (31/3/2022). (Foto Setjen DPD RI).



Ilustrasi BLBI (foto: reqnews)

# Pansus BLBI Dalam Dugaan Rekayasa Aset BCA

Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendalami temuan dugaan rekayasa aset BCA dalam BLBI.

**W**akil Ketua Pansus BLBI DPD RI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menegaskan, skandal BLBI Gate merupakan penjarahan uang rakyat secara besar-besaran. Dana sebesar itu yang seharusnya dapat dinikmati

oleh rakyat kecil melalui pembagian kue pembangunan justru ditilep oleh penjarah-penjarah kelas kakap.

Menurutnya, skandal BLBI ini merupakan salah satu bentuk kejahatan di sektor keuangan.

Pelaku kejahatannya pun sebenarnya mudah diidentifikasi. Namun ironisnya, hukum tidak mampu menyentuh oknum-oknum yang jelas-jelas merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Bahkan pemerintah sendiri lemah tak berdaya menghadapi permainan politik mereka.

Karena itu, dia meminta negara tidak boleh kalah dengan para penilep uang pajak rakyat ini.

“Jangan biarkan maling uang negara tidur nyenyak. Usut tuntas, penjarakan dan miskinikan mereka yang menjarah dana BLBI itu,” tegas senator yang akrab

disapa Habib Banua itu, di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Dijelaskan, kasus BLBI merupakan sejarah kelam dari kebijakan ekonomi di Indonesia.

Karena faktanya, fasilitas BLBI ini banyak yang diselewengkan. Bahkan mengalami penyimpangan penyaluran yang luar biasa.

Penyimpangan ini melibatkan multi pihak dan multi dimensi. Salah satu bentuk penyimpangan yakni obligasi rekap. Obligasi rekap lebih dari Rp 400 triliun dibayar oleh negara Rp1.030 triliun.

“Namun, hanya Rp 110 triliun yang mau ditagih oleh pemerintah kepada para obligor. Ini kan aneh,” kata senator dari Kalimantan Selatan itu.

Selain soal obligasi rekap, Habib juga mempertanyakan soal uang BCA sebesar Rp54 triliun yang diambil Anthony Salim. Dampaknya, pemerintah harus menyuntik BCA sebesar Rp60 triliun.

Padahal nilai BCA ketika itu sebesar Rp87 triliun, namun hanya dijual sebesar Rp 5 triliun.

Karena itu menurut Habib, kejadian ini patut dialami karena ada dugaan rekayasa nilai aset BCA oleh pemilik bank swasta itu.

Dia juga mempertanyakan dasar keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengejar hak negara dari para obligor dan debitur yang totalnya mencapai Rp110 triliun. Padahal, dana BLBI yang dikemplang obligor nakal ini jumlahnya sangat besar.

“Kami mempertanyakan kenapa hanya Rp110 triliun. Angkanya sangat kecil sekali. Apalagi, setiap tahun APBN dibebani pembayaran bunga BLBI Rp48 triliun. Padahal, bunga utang BLBI ini bisa menjadi dana tambahan untuk pembangunan daerah yang saat ini dialokasikan untuk penanganan pandemi,” kata Habib.

## Perlu Gerak Cepat

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak Pansus BLBI DPD RI segera bergerak cepat agar kasus BLBI dapat segera diselesaikan. Karena kasus BLBI sudah terlalu berlarut-larut.

“Pansus BLBI ini harus bergerak cepat. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Kita ingin kasus ini dapat segera dituntaskan,” kata LaNyalla, Selasa (22/3/2022).

Salah satu kunci agar Pansus bisa masuk dalam kasus ini adalah menemukan Novum baru. Sehingga kasus ini dapat diarahkan ke ranah pidana, bukan hanya berhenti di perdata saja.

Senator asal Jawa Timur mengingatkan jika kasus BLBI bisa kedaluwarsa pada 2027. Bisa saja nanti kasus ini menguap begitu saja. Atau, hanya sebatas



Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Foto Ist)

memulihkan, atau mengembalikan kerugian negara saja. Artinya para pelaku yang berpotensi dijerat secara pidana bisa lepas. Ini yang harus diantisipasi Pansus.

Pansus bisa memecahkan masalah ini secara *case by case*. Novum baru bisa menjadi pintu masuk. Setelah itu, selesaikan kasus BLBI ini secara bertahap. Hal ini juga bisa membantu Pansus menelusuri kasus. Sehingga tidak seperti benang kusut yang akhirnya susah menemukan ujungnya.

Pendalaman materi penuntasan kasus BLBI ini dibahas juga dalam Focus Group Discussion di Yogyakarta, Senin (21/3/2022). Hadir sebagai narasumber pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir.

Menurut Ketua Pansus BLBI Bustami Zainuddin, apabila ditemukan novum baru, penanganan BLBI yang saat ini fokus pada hal perdata bisa dibawa ke ranah pidana. Ada beberapa pokok permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama terkait kasus BLBI.

“Beberapa pokok permasalahan antara lain perlunya pemisahan antara BLBI dan obligasi rekap, penjualan aset BLBI oleh pemerintah bersifat undervalue, dan obligasi yang dikeluarkan tidak semua untuk menanggung bunga bank tapi juga menutup obligasi sebelumnya yang telah jatuh tempo,” paparnya. (\*)

# Komite I dan Mendagri Bahas Pemekaran Papua dan Pilkada 2024



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama Mendagri Tito Karnavian usai rapat kerja, Selasa (22/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas soal Pilkada 2024, pemekaran Papua, evaluasi pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Desain Besar Penataan Daerah, Selasa (22/3/2022).

**K**etua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Mendagri Tito Karnavian memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua (OAP) dalam membuat kebijakan terkait pemekaran daerah di tanah Papua dengan meng-

gunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma yang juga senator dari Papua Barat itu mengungkapkan, isu pemekaran di Papua terpecah. Banyak pihak,

mulai dari kepala daerah, tokoh masyarakat di Papua yang menolak adanya pemekaran. Dirinya khawatir, jika pemekaran terus dilakukan akan memunculkan banyak konflik di Papua.

“Bupati-bupati wilayah tengah



Mendagri Tito Karnavian sedang mengisi buku tamu jelang Raker dengan Komite I SPS RI, Selasa (22/3/2022). (Foto: Setjen DPD RI)

menyatakan sikap tidak mendukung pemekaran, termasuk gubernur dan MRP. Solusi bapak adalah kita gunakan *top down*, tapi implikasinya bisa kita lihat sendiri," ucapnya.

Filep menyarankan agar pemerintah saat ini harus menciptakan situasi yang kondusif di Papua. Jangan memaksakan berbagai kebijakan yang ditolak oleh masyarakat Papua. Dirinya menyarankan pemerintah pusat membangun komunikasi dengan masyarakat Papua.

"Pak Menteri panggil gubernur dan sebagainya ke Jakarta, kita komunikasi. Komunikasi harus terus-menerus sehingga tidak menciptakan gangguan keamanan apalagi korban sipil," kata Filep.

Senator dari Jawa Barat Eni Sumarni mengatakan bahwa masyarakat Papua menginginkan adanya pengisian jabatan-jabatan

pemerintahan dan instansi lainnya diisi oleh putra-putra daerah.

"Kenapa tidak mau (pemekaran) sekaligus bareng, karena mereka tidak mau pejabat-pejabatnya diisi dari non Papua. Mereka maunya jabatan di Papua dijabat oleh putra-putri daerah sendiri," ucapnya.

Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad mempertanyakan pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menginginkan adanya pemekaran. Padahal, dalam kunjungan kerja DPD RI ke Papua bertemu MPRP dan DPRP, justru aspirasinya menolak wacana pemekaran.

"Kami ketemu secara langsung dengan MPRP dan DPRP. Mereka menolak pemekaran. Tetapi kenapa Pak Menteri bilang masyarakat sendiri justru ingin pemekaran?" jelas Hilmy.

Terkait Pilkada 2024, Komite I DPD RI meminta Mendagri lebih mengoptimalkan aparatur sipil negara dalam pengangkatan Penjabat kepala daerah yang akan mengisi jabatan kepala daerah yang akan habis masa baktinya sebelum pelaksanaan pilkada.

Merespons pernyataan anggota Komite I, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, ada beberapa hal penting yang berubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, antara lain tentang penambahan dana otsus menjadi 2,25% dan mekanisme pemekaran daerah yang bersifat *top down*. Mekanisme ini dipilih untuk mempercepat pembangunan dan mempercepat birokrasi mengingat wilayah yang luas untuk mengejar ketertinggalan.

Untuk pelaksanaan Otsus Aceh, Mendagri menyebutkan bahwa pelaksanaannya sampai dengan saat ini belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh karena adanya berbagai macam permasalahan. Antara lain dana bagi hasil migas, tata kelola pemerintahan serta harmonisasi program pusat dan daerah.

Berkaitan dengan penataan daerah, bahwa Desain Besar Penataan Daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan penataan daerah yang lebih terarah dan teratur mengingat banyak usulan pemekaran daerah yang muncul sementara adanya keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah.

Terkait pelaksanaan pilkada, Mendagri menyebutkan bahwa diperlukan adanya pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan 272 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya menjelang Pilkada 2024. (\*)



Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai. (Foto: Setjen DPD RI)



Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen. (Foto: Setjen DPD RI)

## RAKER DENGAN MENDAG: Komite II Soroti Kelangkaan Minyak Goreng

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas berbagai isu bahan kebutuhan pokok di daerah, Senin (21/3/2022). Salah satu yang dibahas adalah terkait kelangkaan minyak goreng atau migor.

**A**nggota Komite II mempertanyakan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menghapus harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, kebijakan satu harga untuk minyak goreng

Rp14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, justru membuat minyak goreng di pasaran semakin langka. Termasuk ketika HET ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang.

"Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi

justru yang terasa neraka dalam implementasinya," ucap Yorry dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen.

Dalam rapat tersebut, Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris menilai pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mampu

mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan ataupun pengendalian harga.

“Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya. Harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadan. Kemendag harus menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan minyak goreng agar kedepan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni mempertanyakan penyebab kelangkaan minyak goreng. Padahal tiga bulan terakhir petani sawit telah mengalami panen raya. Tapi justru yang terjadi para petani tersebut tidak bisa memperoleh minyak goreng di pasaran.

Bahkan para pedagang juga

tidak bisa memperoleh minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, senator dari Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya berharap agar Kemendag juga dapat menyelesaikan persoalan bahan pangan lainnya. Menurutnya pemerintah harus memperhatikan komoditi lain seperti gula, kedelai, ataupun bawang putih.

“Upaya untuk komoditas lain apa? Terhadap gula, apa strategi kita? Terhadap kedelai, dan bawang putih. Karena secara khusus di Kalbar, menjelang hari raya dan Ramadan, gula itu meningkat signifikan,” katanya.

Menanggapi pertanyaan anggota Komite II, Menteri Perdagangan

an Muhammad Lutfi mengakui tidak mengharapkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Lutfi menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli minyak curah dengan harga Rp14 ribu per liter.

Dirinya pun mengindikasikan adanya permainan mafia yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Terkait dugaan adanya mafia tersebut, pihaknya sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian.

“Saya juga telah berjanji kepada Presiden dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Saya juga berpikir *never again* untuk melawan mekanisme pasar karena akan memunculkan banyak hal yang tidak terduga,” kata Lutfi. (\*)

## DPD RI Dukung RUU TPKS Disahkan Jadi UU

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi undang-undang (UU).

Seperi diketahui, RUU TPKS dalam pembahasan di DPR RI dan DPD RI. Komite III DPD RI selama ini telah disibukkan dengan menyiapkan materi dan pandangan terhadap RUU tersebut dengan meminta masukan dari pakar.

Menurut rencana, RUU TPKS ini akan disahkan menjadi UU pada bulan April 2022. Bahkan disebutkan akan diundangkan pada 21 April 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada tahun ini.

“Sudah menjadi komitmen DPD RI sejak tahun 2016 mendukung RUU TPKS agar segera dibahas dan ditetapkan menjadi UU. Makanya kami turut prihatin dengan penundaan berkali-kali RUU ini di tengah semakin maraknya kriminalitas terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika membuka secara virtual Webinar RUU TPKS dengan tema “Urgensi Pengesahan RUU TPKS dalam Menyakip Tindak Kekerasan Seksual di

Indonesia”, Rabu (16/3/2022).

Menurut senator dari Jawa Timur itu, kejahatan dan kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa, tetapi dalam hukum internasional dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

RUU TPKS sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini telah diajukan sejak tahun 2016. Namun baru disahkan sebagai inisiatif DPR I pada 18 Januari 2022 lalu. Padahal, RUU ini sebelumnya telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

“Penetapan RUU TPKS seharusnya sudah ditetapkan sejak tahun 2020. Tetapi DPR RI lebih memilih untuk membahas dan merampungkan RUU Cipta Kerja yang hingga

kini sarat dengan perdebatan,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga melansir data Komnas Perempuan tentang peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 12 tahun, yakni 2008 sampai 2019 meningkat sebanyak 792%. Walaupun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan, namun fenomena kekerasan terhadap perempuan harus tetap menjadi *concern* semua pihak.

Yang lebih memprihatinkan lagi, tindak kekerasan juga marak terjadi terhadap anak-anak di bawah umur. Juga kekerasan seksual dari dunia pendidikan yang marak dilakukan oleh orang yang seharusnya mendidik.

“Karena itu saya berharap implementasi UU TPKS yang akan disahkan nantinya tidak hanya dapat menggiring para pelaku ke dalam jeratan hukum. Tapi juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dan hukuman yang akan diterima,”

papar LaNyalla.

DPD RI sebagai pihak yang mendukung RUU TPKS agar segera ditetapkan akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang yang merupakan bagian dari fungsi DPD RI.

“Ke depan, setiap penyerapan aspirasi yang di dalamnya terdapat laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak akan segera kami laporkan untuk segera diproses secara adil,” lanjutnya.

Ditegaskan kembali olehnya, kejahatan dan kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa, kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya.

“Semoga kita terus semangat untuk tetap memperjuangkan hak-hak asasi perempuan dan anak dari kejahatan seksual. Saya berharap pandangan saya terhadap RUU TPKS tidak jauh berbeda dengan pandangan dari Komite III DPD RI,” jelasnya.

Hadir dalam Webinar antara lain Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dan pegiat sosial lainnya.

Sementara itu, Komite III DPD RI telah membahas penguatan substansi dari RUU TPKS dengan pihak-pihak kompeten, seperti Komnas Perempuan, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan dan Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK).

“Komite III DPD RI berkewajiban untuk memastikan pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait penanganan kekerasan seksual yang selama ini sangat lemah dan belum berperspektif pada perlindungan korban,” kata Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni saat rapat pembahasan RUU TPKS tersebut, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/22). (\*)



Webinar RUU PKS dengan tema “Urgensi Pengesahan RUU TPKS dalam Menyikapi Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia”, Rabu (16/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Jumat (18/3/2022) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Foto Setjen DPD RI)

## KOMITE IV DPD RI : Pengelolaan Dana Desa Perlu Pendampingan BPKP

Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (18/3/2022) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**D**alam pertemuan dengan pejabat terkait di kabupaten tersebut, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menyampaikan keten-

duan mengenai penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT), program ketahanan pangan, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 dan program prioritas

masih menghadapi beberapa tantangan.

Di antara tantangan itu, seperti disebutkan Sukiryanto, masih kurangnya kemampuan aparatur desa yang responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi yang dinamis, masih lemahnya kemampuan memetakan kebutuhan kegiatan dan anggaran prioritas, publikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban serta kebijakan daerah.

"Agar terhindar dari penyimpangan di dalam pengelolaan dana desa, maka diperlukan peran pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan dana desa tersebut," kata Sukiryanto.



Ilustrasi pengelolaan dana desa. (Foto: Ist.)

Sekda Dharmasraya Adlisman mengeluhkan pengaturan penggunaan dana desa minimum 40% untuk BLT berpotensi menimbulkan kekakuan dalam pemanfaatannya. Karena setiap desa atau nagari di Sumbar memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda.

“Penggunaan dana desa cukup diatur secara makro dalam bentuk prioritas penggunaannya, tetapi persentase penggunaan disesuaikan kebutuhan dan karakter nagari masing-masing,” kata Adlisman.

Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi Keuangan Syafrizal yang hadir dalam pertemuan itu berpendapat, dana desa tidak efektif karena terlalu diatur oleh pemerintah pusat. “Jika pengaturan penggunaan dana desa minimal 40% untuk BLT, maka hal ini akan menimbulkan persoalan. Dana desa ini jangan terlalu diatur agar desa atau nagari bagi kami di Sumbar dapat leluasa melakukan pembangunan,” kata Syafrizal.

Kepala BPKP Perwakilan Sumbar Dessy Adlin mengakui, melalui dana desa, nagari di Sumbar diberi kesempatan besar dalam melaksanakan pembangunan. Namun

demikian, masih terdapat beberapa temuan permasalahan.

“Temuan permasalahan yang kerap muncul di antaranya mengenai kelalaian administrasi, penggunaan dana desa yang tidak tepat guna dan tepat sasaran,” kata Dessy.

Dalam paparannya, Dessy meminta komitmen dari semua pihak di dalam pengelolaan penggunaan dana desa. Dia meminta komitmen dari inspektorat kabupaten dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi aparat yang terjerat masalah hukum.

Menyikapi apa yang mengemukakan dalam pertemuan itu, Ajiep Padang, senator dari Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

“Dana desa adalah anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah, maka pusat berhak mengatur atas pelaksanaan dan penggunaan dana desa tersebut,” kata Ajiep.

Terkait penggunaan dana desa yang 40% untuk BLT, Ajiep meminta BPKP agar melakukan sosialisasi mengenai penyesuaian

ketentuan yang ada dalam Perpres No. 104/2021.

Muhammad J Wartabone, senator asal Sulawesi Tengah menyampaikan, apa yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu akan dijadikan sebagai rekomendasi tertulis Komite IV yang akan disampaikan kepada mitra kerja terkait.

“Mengenai aturan BLT 40%, DPDRI perlu membuat sebuah ketegasan untuk mengusulkan agar ada tambahan ketentuan bahwa 40% ini berlaku bagi daerah-daerah tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing,” kata Wartabone.

Selain itu, aspirasi mengenai peraturan tentang dana desa yang membingungkan Nagari, Wartabone berpendapat bahwa cukup satu kementerian saja yang membuat aturan tentang dana desa.

Anggota Komite IV dari Sumbar Leonardy Harmaini selaku tuan rumah dan Koordinator Tim Kunjungan Kerja, menyampaikan apresiasinya kepada semua anggota Komite IV yang hadir dalam kegiatan kunker di Dharmasraya tersebut.

“Sebagai senator yang mewakili Sumbar, saya berharap aspirasi hasil dari pertemuan hari ini akan menjadi masukan bagi Komite IV dan disampaikan kepada mitra kerja terkait pada kegiatan rapat-rapat Komite,” kata Leonardy.

Sebelum rapat ditutup, perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Sumbar Maswar Dedi menyampaikan harapannya agar ada peraturan khusus untuk nagari terkait ketentuan penggunaan dana desa (40% untuk BLT). “aturannya jangan disamakan dengan daerah lain karena nagari memiliki keunikan/kekhasan tersendiri,” kata Dedi. (\*)

# PPUU Undang BSSN dan BRIN Bahas RUU Pemerintahan Digital



Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu (dua dari kiri) bersama Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Kepala LNSW Mochammad Agus Rofiudin usai menandatangani kesimpulan rapat membahas RUU tentang Pemerintahan Digital. (Foto Setjen DPD RI)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Digital.

Dalam menyusun RUU tersebut, PPUU meminta masukan dari berbagai pihak terkait dan kompeten. Seperti yang dilakukan pada Rabu (30/3/22), PPUU mengundang Badan Siber dan Sandi Negara

(BSSN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

“Berbicara tentang pemerintahan digital, kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) yang merupakan salah satu faktor penguji perubahan besar di seluruh dunia atau *global megatrends*,” kata Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu ketika membuka rapat yang diselenggarakan secara fisik dan virtual

tersebut di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Disebutkan, dari sejumlah rapat dan kunjungan kerja, PPUU memperoleh sejumlah masukan terkait rencana materi muatan yang akan dikandung dalam RUU tersebut. Setidaknya akan memuat pengaturan tentang kelembagaan dalam pemerintahan digital, penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan digital, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, data, kepemimpinan, otentifikasi dokumen, keamanan sistem, *sustainability system* dan aplikasi, sistem pembayaran, anggaran, hubungan kewenangan pusat dan daerah, audit TIK, percepatan pemerintahan digital, dan pemanfaatan dan evaluasi pemerintahan digital.

BSSN, BRIN dan LNSW diundang untuk dapat memberikan gambaran tentang perkembangan transformasi digital di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, keamanan data atau lebih spesifiknya keamanan digital.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian memaparkan, sesuai UUD 1945 dan sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa pihaknya harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa, lebih berharga dari minyak. Dalam bidang pertahanan keamanan, juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber.

"BSSN hadir karena mengamankan ruang ini, yaitu *cyber space* (ruang siber) nasional kita yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan internet. Sehingga membutuhkan suatu sistem elektronika yang dapat digunakan sebagai ruang atau domain untuk menciptakan

“ Ide besarnya *Single Window* biasanya dihubungkan dengan *Trade Facilitation*, yaitu upaya masif untuk menyederhanakan, memodernisasi dan mengharmonisasi proses yang umumnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga ekspor dan impor.”

kondisi strategis yang menguntungkan suatu negara di seluruh aspek Ipoleksosbudhankam,” kata Hinsa Siburian.

Jika dibutuhkan regulasi setingkat UU, sebaiknya yang mampu mengakomodasi transformasi digital secara nasional, tidak hanya di pemerintahan. Juga dibutuhkan regulasi setingkat UU yang mampu mengakomodasi tata kelola keamanan siber dan sandi secara inklusif (*multi-stakeholder*).

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito mengungkapkan, setelah sekitar dua dekade perkembangan pemerintahan digital di Indonesia, regulasi nasional yang mengatur kelembagaan dan teknis operasionalisasinya belum tersedia dengan baik.

Sejumlah peraturan tersebut, dalam praktiknya hanya mampu mendorong pertumbuhan jumlah *website* resmi lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Regulasi yang ada tidak mampu mendorong pelebagaan pemerintahan

digital secara terintegrasi dan menjangkau kawasan pinggiran.

“Saat ini belum ada produk hukum atau regulasi yang sifatnya strategis yang mengatur pemerintahan digital secara rinci. Sejauh ini hanya ada UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perpres No 74/2017 tentang Peta Jalan E-commerce, dan PP No 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” jelas Mego.

Kepala LNSW Mochammad Agus Rofudin menjelaskan peran lembaga yang dipimpinnya dalam perdagangan internasional dan nasional secara terintegrasi/kolaborasi. Kepentingan nasional untuk mendorong kinerja pelayanan ekspor impor dan penyelesaian permasalahan arus barang.

Indonesia National Single Window (INSW) adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ide besarnya *Single Window* biasanya dihubungkan dengan *Trade Facilitation*, yaitu upaya masif untuk menyederhanakan, memodernisasi dan mengharmonisasi proses yang umumnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga ekspor dan impor. Harapannya para pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan terintegrasi dengan satu pemerintah saja atau *single poin of entry*, karena saat ini masih mengajukan berulang kepada 18 kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya. (\*)



Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Bambang Sutrisno saat menjadi narasumber di Youtube Chanel Kabar Senator, Jakarta, Senin (21/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

## BAP DPD RI : Kasus Sengketa Tanah Kerap Terjadi di Daerah

Kasus sengketa tanah kerap terjadi di daerah antara masyarakat dengan perusahaan. Bahkan, permasalahan itu memerlukan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya dan masyarakat selalu saja berada dalam posisi yang lemah.

**D**emikian diungkapkan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Bambang

Sutrisno saat menjadi narasumber di Youtube Chanel Kabar Senator, Jakarta, Senin (21/3/2022).

“Kebanyakan masyarakat pada posisi yang lemah di fakta dan data.

Sehingga ketika kita hadir dan mediasi, mereka selalu kekurangan data dan fakta. Memang kita perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Per-

## ■ Varia Senat

tanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuat terobosan masalah sengketa tanah seperti ini,” ungkap senator dari Jawa Tengah Tengah tu.

Bambang Sutrisno juga mengakui bahwa tugas BAP DPD RI dalam menyelesaikan sengketa tanah itu sangat berat. Namun dia mengaku ada kepuasan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat itu.

“Artinya jika masalah itu bisa diselesaikan maka ada sumbangsih dari DPD RI yang telah diberikan kepada masyarakat. Kami merasa ada kepuasan batin jika menyelesaikan suatu permasalahan. Namun dukanya yaitu jika tidak ada titik temu antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat bagi yang ingin menyampaikan permasalahan kasus kepada BAP DPD RI baik sengketa tanah, ganti rugi atau lainnya harus menyiapkan data-data pendukung yang lengkap.

“Memang terkadang masyarakat mengirimkan data-data yang tidak lengkap, namun tetap kita tindaklanjuti. Tapi jika masyarakat memberikan data-data yang lengkap, maka kami bisa segera cepat bertindak,” imbuh Bambang Sutrisno.

Bambang Sutrisno juga menambahkan, pengaduan tersebut bisa disampaikan kepada Pimpinan DPD RI ataupun Ketua BAP DPD RI. Nantinya pengaduan itu akan ditelaah terlebih dahulu oleh BAP DPD

RI sebelum ditindaklanjuti.

Apabila hasil telaahan tersebut relevan, maka akan ditindaklanjuti. Puncaknya dengan menghadirkan semua *stakeholder* yang terlibat dalam kasus sengketa tersebut.

Diungkapkan, dari pengaduan yang disampaikan ke DPD RI, sudah Banyak masalah yang telah diselesaikan. Salah satunya masalah perizinan listrik di Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, permasalahan itu sudah kami selesaikan dan sudah disetujui oleh Bupati setempat. Sebenarnya permasalahan itu hanya komunikasi saja, kita dudukkan semua yang terlibat. Alhamdulillah kendala selama 13 tahun ini sudah bisa terselesaikan,” terang Bambang Sutrisno. (\*)



Warga Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara saat memasang plang di lokasi lahan sengketa. (Foto: Ist.)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Kepala BSSN Hinsia Siburian menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

## Setjen DPD RI Gandeng BSSN Tingkatkan Layanan SPBE

Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam upaya meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

**D**alam menjalin kerja sama tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Kepala BSSN Hinsia Siburian, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakar-

ta, Senin (21/3/2022).

"Kita menyambut baik dan berterima kasih adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini sebagai salah satu landasan bagi DPD RI, untuk bersinergi dalam mendukung peningkatan layanan SPBE di lingkungan Setjen DPD RI,"

kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi berharap, penandatanganan kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini menjadi suatu pijakan strategis bagi Setjen DPD RI. Menurutnya, pemanfaatan sertifikat elektronik salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintahan yang baik.

"Sertifikat elektronik sangat praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materi untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen," ujar Rahman Hadi.

Ia menilai perubahan ini memberikan banyak kemudahan, seperti penggunaan sistem elektronik yang meniadakan pertemuan tatap muka antar pihak. Namun di sisi lain, tidak bertemunya para pihak dalam transaksi elektronik juga meningkatkan resiko penipuan identitas, karena setiap orang dapat mengaku sebagai orang lain.

“Dalam rangka menjamin hal tersebut, peran lembaga BSSN sebagai pihak untuk menjamin tanda tangan elektronik yang akan dilakukan menjadi tersertifikasi,” kata Rahman Hadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI Nana Sutisna mengatakan, nota kesepahaman antara DPD RI dengan BSSN tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik, bertujuan untuk menciptakan payung hukum

dalam beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup itu akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama teknis antara unit BSSN dan Setjen DPD RI.

Nana Sutisna juga menjelaskan, salah satu perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan DPD RI. Perjanjian itu meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah. Termasuk juga pemanfaatan kedatangan elektronik bagi Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Pimpinan Setjen DPD RI.

Kepala BSSN Hinsa Siburian berharap dengan adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini bisa menciptakan keamanan siber yang kondusif. Dia mengakui dalam upaya meningkatkan

kewaspadaan nasional, BSSN membentuk Tim Respon Insiden Keamanan Komputer atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat nasional.

“CSIRT bertujuan untuk *support* di sektor pemerintah, infrastruktur informasi vital nasional, dan ekonomi digital,” paparnya.

Hinsa berharap pencapaian penugasan tersebut juga dapat diakselerasi mengingat ancaman dan risiko keamanan siber semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

“Upaya kita dalam melakukan pengelolaan keamanan ruang siber untuk memperkuat ekonomi digital nasional harus terus dioptimalkan. Ada banyak sektor yang harus digandeng bersama dalam rangka penguatan pengelolaan keamanan siber di sektor perekonomian,” ucap Hinsa.(\*)

## DEPUTI PERSIDANGAN: DPD RI akan Menjadi Lembaga yang Kuat dan Aspiratif

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Sefty Ramsiaty meyakini bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menjadi lembaga yang lebih kuat dan aspiratif sesuai dengan yang dicita-citakan pada saat awal terbentuknya.

**K**eyakinan Sefty Ramsiaty itu disampaikan saat menjadi narasumber di YouTube Kabar Senator yang dipandu oleh Kepala Biro

Protokol, Humas dan Media (PHM) Mahyu Darma, Rabu (27/3/2022).

“Bicara tentang visi, kita kembali kepada lembaga ini sendiri. Kami mencoba untuk tidak lepas

dari visi itu, baik akuntabel dan modern dalam *supporting system*,” ucap Sefty.

Dia menjelaskan misi dari Kedeputian Persidangan DPD RI yang dia pimpin, yaitu harus mampu memberikan dukungan administrasi yang berkualitas baik kepada para anggota DPD RI ataupun Sekretariat Jenderal DPD RI. “Misi kita harus mampu memberikan dukungan administrasi,” ujar Sefty.

Sefty selalu menghimbau kepada unit-unit di bawah Deputi



Sefty Ramsiaty itu disampaikan saat menjadi narasumber di YouTube Kabar Senator yang dipandu oleh Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Mahyu Darma, Rabu (27/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Persidangan, yaitu Biro Persidangan harus bekerja dengan hati. Lanjutan, seluruh staf hingga pejabat eselon II harus bekerja lebih dari delapan jam sehari.

“Waktu bekerja lebih lama ketimbang bertemu dengan keluarga. Maka kita harus menyalakan untuk bagaimana betah bekerja, tentunya bekerja dengan hati dan

sopan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, bekerja di lembaga politik ini semua harus tetap berjalan walaupun tanpa anggaran sekalipun. Untuk itu, pihaknya membuat kegiatan seoptimal mungkin dan tentunya dengan aturan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Menjaga anggota DPD RI itu

sebenarnya lebih dari menjaga diri kita sendiri. Maka kita semua harus benar-benar bekerja dengan hati,” paparnya.

Tidak sampai di situ, sambungnya, secara rutin pihaknya juga sering mengadakan rapat secara berkala di setiap unit. Tetapi di luar pertemuan itu, pintu ruangan saya terbuka bila ada persoalan ataupun saran.

“Artinya saya berupaya melakukan pendekatan kepada seluruh unit kerja. Bahkan ketika waktu senggang saya suka datang ke ruangan-ruangan untuk melakukan diskusi. Jadi kembali lagi pada komunikasi,” imbuh Sefty.

Sefty juga menjelaskan, kesetiaan DPD RI saat ini sedang mengarah *paperless*. Apalagi pada saat pandemi ini, pihaknya juga sudah mengadakan rapat secara kombinasi baik virtual atau fisik dengan protokol kesehatan.

“Kita memang sudah dituntut untuk melek teknologi. Memang rapat-rapat di alat kelengkapan kita harus belajar tentang teknologi. Seluruh perangkat mau tidak mau harus kita lakukan,” kata Sefty. (\*)

## Sekjen DPD RI Bekali CPNS 2022

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Rahman Hadi membuka acara orientasi dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Setjen DPD RI secara simbolis, Rabu (23/3/2022).

Melalui orientasi itu, mereka yang baru saja lulus mengikuti seleksi penerimaan PNS di lingkungan Setjen DPD RI itu dapat mengenal karakter kerja dan tata kelola di lingkungan tempat mereka bekerja.

“Orientasi ini mereka diharapkan dapat mengenal karakter kerja dan tata kelola kelembagaan DPD RI. Untuk itu pada kesempatan orientasi ini semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa memahami DPD RI seperti apa,”



Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyerahkan secara simbolis SK CPNS Setjen DPD RI, Rabu (23/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)

kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi yang turut didampingi Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Mahyu Darma, dan Kepala Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian Susi Mulyani mengingatkan, sebagai bagian keluarga baru di lingkungan Setjen DPD RI, tentu harus memahami tugas pokoknya sehingga *output*-nya menjadi jelas. Seluruh CPNS harus memberikan dukungan administrasi dan keahliannya.

Rahman juga mengingatkan kepada CPNS Setjen DPD RI itu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan. Pola kehidupan dan *ritme*

bekerja saat ini harus pandai menyesuaikan perkembangan zaman.

“Selama dua tahun belakangan ini kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Mau tidak mau saudara-saudari harus mengikuti kebijakan itu,” kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi juga berpesan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai jiwa birokrasi sehingga memenuhi kewajiban dalam berkomitmen. Ketika seseorang mempunyai komitmen maka akan sangat mungkin bisa bekerja dengan sukses.

Komitmen saja tidak cukup, namun harus dibarengi oleh *team work*. Rahman Hadi menegaskan,

*team work* sangat dibutuhkan dalam pekerjaan, khususnya di lingkungan Setjen DPD RI.

“Bekerja DPD RI itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh suatu *team work* untuk bisa mencapai suatu target yang maksimal,” tuturnya.

Rahman Hadi pun memberikan tips dalam mencapai kesuksesan dalam berkarir. Ada empat kunci utama mencapai kesuksesan versi Rahman Hadi, yaitu jangan takut bermimpi, kekuatan berfikir, percaya diri, dan semangat. “Empat kunci ini adalah kesuksesan dalam karir. Namun terpenting yaitu kekuatan doa,” ujarnya. (\*)

# Penguatan Aspek Pertahanan dan Keamanan Terhadap IKN Nusantara

Oleh: Reza Pratama Riansyah

D isahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada 18 Januari 2022 sesuai dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Ibu Kota Negara baru dengan nama Nusantara. Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya di hadapan Sidang MPR RI menyampaikan rencana untuk memindahkan ibu kota negara dan kemudian disusul dengan pengumuman resmi pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur oleh Presiden pada tanggal 26 Agustus 2019.

Pemindahan itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa DKI Jakarta sudah tidak lagi mampu mengemban peran sebagai ibu kota negara secara optimal dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, serta ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di NKRI (Bap-

penas, 2019).

Berbicara tentang kepindahan ibu kota negara adalah sesuatu hal yang memerlukan kajian panjang, bukan sesuatu proses yang instan dan cepat atau dalam pemikiran jangka waktu yang pendek. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk didalamnya adalah wilayah yang menjadi lokasi tujuan pemindahan. Rencana pemindahan ibu kota NKRI memang sudah terdengar gaungnya semenjak era pemerintahan Presiden Soekarno.

Pemindahan ibu kota negara baru akan menimbulkan banyak peluang baru apabila disiapkan dengan maksimal. Schatz (2003) menjelaskan secara teori bahwa pemindahan ibu kota yang dideesain dan dieksekusi dengan baik (*well-designed dan well-executed*) dapat memberikan peluang ekonomi dan pelayanan pemerintahan sebagai solusi masalah ketimpangan pada daerah lain. Pemindahan ibu kota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak persiapan termasuk di dalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial dan juga pro dan



kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait pemindahan ibu kota negara.

Berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara yang harus diperhatikan, yaitu keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang mana hal tersebut memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat, seperti: 1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat; 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif; 3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsi sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural; 4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi

upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan; 5. Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, lima komponen tersebut harus dipenuhi sebagai salah satu acuan dalam wacana pemindahan ibu kota NKRI dalam konteks kebijakan pemerintah daerah karena situasi yang tercipta adalah situasi yang harus kondusif bagi masyarakat. Lima komponen tersebut di atas, dapat dikaitkan kepada beberapa aspek, salah satunya yaitu terdapat aspek pertahanan dan keamanan.

Kesiapan ibu kota negara pada pertahanan dan keamanan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi Jakarta dan pemindahan ibu kota. Hal itu karena eksistensi dan kedaulatan sebuah negara ditentukan oleh penguasaan dan pengendalian ibu kota oleh negara itu sendiri. Keberadaan dan kedaulatan negara hanya dapat diwujudkan jika pertahanan dan keamanan ibu kota negara tersebut kuat.

Pada masa lalu, Indonesia pernah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Alasannya adalah Jakarta rentan dikuasai asing yang telah mendekati Teluk Jakarta, sementara kekuatan pertahanan nasional tidak memadai untuk melawan. Saat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, muncul pemerintahan darurat di Sumatera. Namun, perlawanan melalui Serangan Umum justru dilakukan ke Yogyakarta agar dunia percaya bahwa Indonesia masih eksis.

Dasar pemindahan ibu kota beberapa negara lain juga terkait aspek pertahanan. Brasil memin-

ahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia karena rentan serangan dari laut. Alasan serupa membuat Pakistan dan India memindahkan ibu kotanya ke pedalaman. Dari Karachi ke Islamabad, dan dari Kolkata ke New Delhi. Australia juga lebih memilih Canberra daripada Sydney dan Melbourne karena kedua kota itu rentan diserang dari laut.

Secara letak geografis, Jakarta berada di tepi laut. Namun, wilayah pantai Jakarta berada di perairan teritorial sehingga tidak mudah diinvasi dari laut. TNI pun masih dapat menghambat pergerakan invasi di mandala pertahanan luar (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI) dan mandala pertahanan utama (ZEEI hingga laut teritorial). Ancaman invasi darat lebih kecil karena Indonesia negara kepulauan.

Untuk masa yang akan datang, wilayah ibu kota negara baru kemungkinan memiliki risiko serangan darat, termasuk terorisme karena Indonesia mempunyai perbatasan darat yang panjang dengan negara lain. Sebenarnya, hutan lebat dapat menjadi sarana pertahanan yang baik. Namun, kepentingan pemertaaan pembangunan mendorong pembangunan jalan hingga perbatasan. Hal itu berguna memperkuat ketahanan nasional di perbatasan, termasuk loyalitas warga kepada Indonesia. Namun, itu juga menaikkan risiko teritori wilayah Indonesia khususnya akses menuju ibu kota negara baru lebih mudah ditembus.

Aspek pertahanan dan keamanan sangatlah penting mengingat Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan dan secara geografis lokasi tersebut sangatlah dekat dengan negara-negara tetangga. Sehingga pertahanan dan keamanan merupakan modal utama dari pemindahan ibu kota negara baru agar meminimalisir

sekaligus menghilangkan potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan serta kedaulatan negara.

Masalah yang lebih kompleks adalah gelar pasukan TNI dan Polri yang selama ini memusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Untuk matra darat, pasukan komando Kopassus dan pasukan pemukul Kostrad berada di Jakarta, dan provinsi lain di Jawa. Penambahan divisi Kostrad luar Jawa berpusat di Sulawesi, tetapi butuh waktu, anggaran, dan penambahan pasukan.

Komando Armada Angkatan Laut juga masih terkonsentrasi di Jakarta dan Surabaya. Organisasi komando AL yang baru dibangun di Papua, tetapi perlu waktu, anggaran, serta penambahan pasukan dan alutsista yang signifikan. Hanya Komando Operasi Angkatan Udara yang sudah ditempatkan di Jakarta dan luar Jawa (Makassar) berikut gelar jet tempur di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan kawasan timur. Penambahan komando operasi di Papua juga memperkuat pengendalian udara di kawasan timur. Akan tetapi, mata dan telinga pertahanan udara, yakni Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), berada di Jakarta. Beragam alutsista akan menjadi sasaran empuk jika pusat komando dan kendali tidak dipertahankan dengan baik.

Gelar pasukan dan alutsista strategis tersebut membawa konsekuensi penempatan pasukan dan alutsista untuk melindunginya. Radar dan satelit pertahanan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, tetapi roket dan rudal, termasuk jet tempur, mempunyai keterbatasan jelajah. Hingga kini, sistem pertahanan udara yang kita miliki baru pertahanan titik dan berjangkauan menengah. Padahal,

kecepatan dan ketepatan bertindak, utamanya dalam pertempuran udara, menentukan hasil akhir. Karena itu, pemindahan ibu kota berarti memindahkan pasukan dan alutsista strategis pelindungnya.

Sebagai pusat pemerintahan, Nusantara harus disiapkan sedemikian rupa agar mampu menghadapi dua jenis ancaman, yakni "ancaman tradisional" yang berupa ancaman militer dari aktor negara yang ingin mengganggu, mengancam, atau merusak kesatuan serta kedaulatan NKRI dan berikutnya "ancaman non-tradisional" yakni ancaman dari aktor non-negara berupa teror, perampokan, kriminalitas, penyelundupan obat-obatan terlarang dan lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Untuk menghadapi ancaman tradisional, Nusantara perlu dilengkapi dengan peralatan dan pasukan militer yang memadai untuk melindungi dan memastikan keamanan kepala pemerintahan, juga pejabat-pejabat tinggi negara. Kemudian penduduk yang tinggal di ibu kota pemerintahan, perlu dibentuk menjadi masyarakat yang siap siaga, tanggap, dan tangguh. Sehingga untuk mendukung hal-hal tersebut, diperlukan infrastruktur pendukung, di antaranya bandara, pelabuhan, pangkalan militer, akses jalan yang memadai ke kota-kota sekitarnya, serta pusat data untuk mencegah kejahatan siber dan sebagainya.

Selama ini kekuatan TNI terpusat di Jawa. Alasannya, pusat pemerintahan RI ada di Jawa dan lebih dari 50% penduduk serta pusat pemerintahan (ibu kota negara) dan pusat perekonomian Indonesia terpusat di Jawa (gambaran *sederhana centre of gravity* Indonesia). Terdapat beberapa ukuran yang perlu diperhatikan dalam

memperkuat pertahanan dan keamanan ibu kota negara baru. Ukuran pertama, kekuatan TNI di Jawa jangan dikurangi. Jawa sebagai pusat perekonomian Indonesia tidak berubah dan perlu pertahanan yang kuat. Kedua, gelar kekuatan TNI di Kalimantan perlu ditambah, minimal relatif sama dengan di Jawa. Untuk kekuatan pertahanan darat, setiap provinsi di Kalimantan perlu dibangun satu Kodam, lengkap dengan kekuatan satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasinya sehingga idealnya ada lima Kodam di lima provinsi. Sama seperti yang dilakukan di Jawa. Sekarang baru ada dua Kodam, yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Harus ada penambahan tiga lagi, masing-masing di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Gelar kekuatan pertahanan laut juga harus ditambah, terutama di Ujung Pandang dan Manado, serta pembentukan pangkalan baru di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Daerah sekitar sungai besar di Kalimantan harus dirancang sebagai daerah gelar satuan marinir. Selain itu, perlu ada desain ulang tentang disposisi gelar kapal selam supaya lebih efektif melindungi Nusantara. Kekuatan ini akan memperkuat kekuatan yang sudah ada di Armada I (Jakarta), II (Surabaya), dan III (Sorong). Demikian juga dengan kekuatan pertahanan udara harus ada penambahan pada tempat-tempat yang strategis untuk melindungi Nusantara. Pangkalan udara di tiap provinsi menjadi penting untuk mendukung mobilisasi pasukan darat dan untuk proyeksi kekuatan pesawat-pesawat tempur. Semua kekuatan baru itu hanya perkiraan kasar. Secara detail perlu dihitung, baik komposisi maupun disposisinya.

Ukuran gelar kekuatan pertahanan baru di Kalimantan menjadi ukuran utama dan prioritas, kekuatan TNI harus lebih superior di Pulau Kalimantan jika dibandingkan dengan kekuatan Angkatan Bersenjata Malaysia dan Brunei, dua negara yang berbatas darat dengan Indonesia di Kalimantan. Menghitung kekuatan Malaysia dan Brunei harus mempertimbangkan potensi pengerahan kekuatan FPDA (*Five Power Defense Arrangement*) yang terdiri atas Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura.

Hal ini bukan berarti menempatkan Malaysia sebagai negara musuh. Namun, dalam dunia internasional yang anarkistis (*anarchical international system*), tidak ada kekuatan tertinggi di atas negara, hanya ada satu cara terbaik untuk *survive* sebagai sebuah negara, yaitu menjadi terkuat atau superior. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Malaysia mestinya bisa memahami mengapa gelar TNI perlu ditingkatkan di Kalimantan. Akan tetapi, komunikasi dengan pemerintah Malaysia memang harus terus dibangun agar tidak terjadi penafsiran lain yang menyebabkan Malaysia merasa terancam dengan penambahan kekuatan TNI di Kalimantan.

Ukuran kedua, kekuatan TNI di Kalimantan harus didesain untuk mampu diproyeksikan lebih efektif untuk mendukung pengerahan ke wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Dengan posisi Kalimantan di tengah-tengah Indonesia, hal ini akan lebih mudah dilakukan karena jarak yang lebih dekat. Pertahanan negara menyangkut kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, dibutuhkan visi bersama dan komitmen yang tinggi dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkannya. (\*)

# Menyikapi Demo 1104

Oleh: **Tamsil Linrung**  
(Anggota DPD RI)



Ada yang berubah dari substansi narasi Presiden RI Joko Widodo. Sebulan lalu, Presiden bilang siapapun boleh-boleh saja memunculkan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebulan kemudian, Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan Pemilu atau presiden tiga periode.

**P**enegasan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, sehari sebelum demo besar BEM SI. Mengapa Jokowi berubah? Kalau melihat momentumnya, boleh jadi karena eskalasi gerakan mahasiswa. Sebelum demo besar 11 April 2022, berbagai demonstrasi pendahuluan telah marak terjadi di daerah. Di Jambi, kunjungan kerja presiden yang disambut demo mahasiswa bahkan membuat orang

nomor satu di tanah air itu dikabarkan mengambil langkah seribu.

Perubahan sikap Jokowi terkait penundaan Pemilu tak mengubah rencana mahasiswa. Lagi pula, demo kali ini tidak cuma terkait penundaan pemilu semata. Banyak aspirasi lain yang harus disampaikan, sehingga unjuk rasa pada 11 April 2022 tetap dilakukan.

Alhasil, jalan-jalan kembali menjadi podium, mobil komando kembali menjadi panggung pe-

nyampai aspirasi. Lautan manusia membanjiri depan Gedung Parlemen. Jakarta dan sejumlah kota besar lain gegap gempita, tetapi media sepi meliput. Minimnya pemberitaan tak membuat bara api semangat mahasiswa meredup. Media sosial menjadi sarana alternatif penyampai informasi.

Sayangnya, aksi demo diwarnai insiden pengeroyokan terhadap Dosen UI Ade Armando. Peristiwa ini jelas melawan hukum. Namun, sebagai bahan renungan, tidak juga keliru bila melihatnya sebagai warning kian menajamnya polarisasi. Ketidakadilan jangan-jangan telah membuat luka hati masyarakat mengendap seperti *magma* di perut bumi. Ketika endapannya semakin besar, magma terdorong kuat dan menyembur melalui gunung api begitu menemukan momentum.

Kita menyerahkan penyelesai-

an pengeroyokan Ade Armando kepada aparat kepolisian. Sang pengeroyok tentu harus diusut tuntas. Disaat bersamaan, status tersangka Ade Armando sejak 2017 melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus pula diselesaikan hingga berkekuatan hukum tetap, agar rakyat merasakan keadilan.

Di luar persoalan itu, demonstrasi mahasiswa adalah refleksi dari proses demokrasi sekaligus ekspresi kebebasan berpendapat atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dipandang. Terlebih, undang-undang menjamin kebebasan berpendapat di muka umum dan demokrasi menginginkan partisipasi masyarakat mengawal jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, unjuk rasa mahasiswa sebaiknya tetap dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kepedulian pemuda terhadap problem pokok bangsa.

Perlawanan mereka adalah jihad konstitusi.

Mahasiswa menolak penundaan Pemilu, sebab penundaan Pemilu adalah itikad buruk yang menyangkangi konstitusi. Mahasiswa meminta stabilitas harga pangan, sebab kebutuhan pokok yang terjangkau merupakan hak rakyat sekaligus kewajiban negara. Mahasiswa meminta evaluasi UU IKN, sebab UU IKN dipandang banyak menimbulkan masalah, di samping sangat minim partisipasi publik, dan memang belum layak di tengah berbagai problem ekonomi bangsa. Pun dengan tuntutan lainnya: usut tuntas mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria, dan realisasi janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin adalah hal lumrah yang layak ditagih.

Maka, negeri ini harus bangga masih memiliki kaum intelektual muda yang senafas dengan rakyat, yang merasakan dan memper-

juangkan persoalan mereka. Itulah sejatinya jati diri mahasiswa, yang tidak akan diam melihat pembungkaman, ketidakadilan, atau penghilangan hak-hak rakyat. Gerakan mahasiswa adalah reaksi atas aksi-aksi kegagalan pemerintah melaksanakan tugasnya. Kegagalan itu memuncak pada rapuhnya ekonomi bangsa yang, sayangnya, diiringi belitan hutang negara yang telah menembus angka 7.000 triliun.

Sayangnya, berbagai kebijakan yang ditempuh justru semakin membuat bangsa terpuruk lebih dalam. Apa urgensinya IKN di tengah problem ekonomi kita? Mengapa harus ada pembelahan di sana-sini? BEM SI diadu dengan BEM Nusantara yang terkesan sebagai bentukan pemerintah. APDESI diadu dengan APDESI "baru" yang palsu karena tidak terdaftar di Kemenkumhan. Semakin bangsa ini terbelah, semakin lemah NKRI, walau semakin keras dielukan sebagai harga mati.

Kini, pascademo, apa yang harus dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan, pemerintah harus introspeksi diri, segera melakukan perubahan kebijakan yang signifikan, dan memenuhi tuntutan mahasiswa. Bila tidak, maka tidak menutup kemungkinan aksi-aksi mahasiswa berikutnya terus terjadi dan justru berpotensi memicu gerakan-gerakan dari elemen masyarakat lainnya.

Sejarah menuliskan, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Soeharto yang berkuasa 32 tahun saja harus tumbang. Kita tidak ingin itu terjadi pada Pemerintahan Joko Widodo. Maka, Presiden Jokowi harus pula belajar dari sejarah itu. (\*)



Demo Akbar Mahasiswa 1104 Berpotensi Mengulang Peristiwa 1998. (Foto: Ist.)

Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si :

# DPD RI Jalan Tepat untuk Mangabdi pada Negeri



Nama Sylviana Murni sudah tidak asing di telinga rakyat Indonesia, terlebih bagi warga DKI Jakarta. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, Sylviana Murni salah satu calon wakil gubernur mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

**S**etelah gagal pada Pilkada DKI, perempuan dengan rekam karier 31 tahun sebagai birokrat di Jakarta ini, mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2019.

Dirinya menilai DPD RI sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah karena memiliki tugas pokok dan fungsi lebih independen atau bukan merupakan bagian dari partai politik.

Tanpa harus melalui jalur partai politik, perempuan berdarah Betawi ini menekankan, tetap dapat melayani segala aspirasi dan permasalahan masyarakat, terlebih bagi masyarakat Jakarta. Berikut petikan wawancara mantan Walikota Jakarta Pusat ini dengan *Majalah Senator*, Kamis (31/3/2022).

**Alasan Anda memilih jalur politik melalui DPD RI?**

Saya memilih jalur DPD RI karena bukan merupakan perwakilan dari partai politik. Saya berfikir, dengan latar belakang saya sebagai birokrat selama 31 tahun, mulai dari jabatan sebagai staf hingga menduduki jabatan eselon 1 dan kemudian ikut kompetisi Pilgub DKI Jakarta,

melalui DPD RI saya masih dapat berjuang dan mengabdikan kepada masyarakat.

### ***Apa saja yang Anda harus perjuangkan untuk Jakarta?***

Saya harus memperjuangkan semua aspirasi masyarakat DKI Jakarta dan memperjuangkannya dengan hati. Artinya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dengan latar belakang kultur Betawi yang kental, ayah saya orang Betawi Jatinegara, dan ibu Betawi Cikini, alhamdulillah hampir semua permasalahan di Jakarta dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak terkait sebagai upaya penyelesaiannya.

Setiap keberhasilan menyelesaikan persoalan tidak perlu mendapat ekspos yang terlalu dibesarkan. Terpenting kita dapat melayani masyarakat Jakarta dengan hati dan niat untuk beribadah. Karena saya sudah menyerahkan atau mewakafkan diri saya tentunya atas rido suami, yaitu untuk terus berjuang dan membantu apa yang menjadi aspirasi masyarakat dimanapun berada.

### ***Aspirasi Jakarta yang telah terealisasi?***

Mungkin tidak bisa satu persatu dan secara detail disampaikan, tetapi alhamdulillah paling tidak di beberapa daerah di luar Jakarta memerlukan sertifikasi hak kepemilikannya. Saya kebetulan cukup dekat dengan Menteri Agrarian, sehingga bisa saya komunikasikan. Kemudian ketika Mandalika memerlukan bantuan pembangunan, kita bicarakan dengan Kementerian PUPR. Semua itu, alhamdulillah saya bisa komunikasikan, tentunya dengan melalui pimpinan DPD RI seperti Pak LaNyalla. Termasuk, permasalahan di masyarakat dari soal haji, pendidikan, dan kita bisa menjadi katalisator serta menjadi mediator bagi daerah-daerah, karena kita DPD RI memiliki *tag line* dari daerah untuk Indonesia, dan insya Allah saya dapat mengabdikan diri saya di sini.

### ***Kegiatan Anda selain anggota DPD RI?***

Saat ini ada sekitar 20 organisasi sosial kemasyarakatan yang saya pegang, baik sebagai ketua umumnya langsung atau sebagai wakil ketua, dan sebagai koordinatornya. Tentunya, dengan rutinitas seperti ini, saya sangat menikmatinya, lantaran semua yang dikerjakan sepenuh hati. Peran serta keluarga dan campur tangan Allah SWT memiliki andil yang sangat besar dalam setiap urusan yang saya kerjakan. Artinya, saya memohon kepada Allah SWT agar dapat tetap dijaga dan sesuai dengan jalannya.

Saya juga bersyukur memiliki suami yang luar biasa memberikan *support*-nya dan memiliki anak-anak dan keluarga yang luar biasa. Semua ini menjadi *dream team* bagi saya dalam mendukung semua kegiatan

saya sehingga insya Allah saya dapat mewakafkan diri saya untuk masyarakat.

### ***Kendala yang Anda hadapi sebagai anggota DPD RI?***

Saya yakin, setiap pekerjaan tentu ada masalah yang dihadapi. Akan tetapi, semua permasalahan itu saya kembalikan pada keyakinan saya pada janji Allah SWT. Bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Dan saya yakin setiap kendala akan menjadi tantangan bagi saya. Sehingga, saya menikmati semua pekerjaan-pekerjaan saya ini dengan senang hati, dan alhamdulillah Allah SWT selalu membuka jalan setiap kali saya menghadapi suatu kendala.

### ***Bagaimana mengantisipasi setiap kendala yang ada?***

Pertama kuasai dulu setiap permasalahan yang kita hadapi. Setelah itu kita melihat dalam diri kita, kemampuan, kelemahan, dan apa yang menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita sudah dapat mengetahui dan menguasai apa yang ada dalam diri kita, insyaallah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Karena saya yakin betul Allah akan membantu kita di setiap ada permasalahan. (\*)

## DATA DIRI

### **Nama :**

Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.

### **Tempat, Tanggal Lahir :**

Jakarta, 11 Oktober 1958

### **Status :**

Kawin

### **Jabatan :**

- Walikota Jakarta Pusat 2008 – 2010
- Deputy Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
  - Anggota DPD/MPR RI Periode 2019-2024
  - Ketua Komite III DPD RI Periode 2020-2021
- Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta & Dosen Program Doktor Universitas Negeri Jakarta

### **Pendidikan**

- S1 Universitas Jayabaya Tahun 1977-1983
- S2 Universitas Indonesia Tahun 1996-1999
- S3 Universitas Negeri Jakarta Tahun 2003-2005
- Gelar Guru Besar (Profesor) Tahun 2008

### **Diklat**

Lemhanas RI Tahun 2010



Di antara senator yang hadir secara fisik dalam Sidang Paripurna DPD RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2021-2022 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar kehormatan Ampon Chiek dari Kerajaan Beutong, Aceh saat berkunjung ke kerajaan tersebut, Kamis (24/3/2022). Gambar atas LaNyalla bersama Paduka Yang Mulia Ampon Daulat Tuanku Raja Beutung IX, Teuku Raja Keumangan didampingi senator dari Aceh M Fadhil Rahmi, Fachrul Razi (nomor 1 dan 2 dari kiri) dan Abdullah Puteh (paling kanan). (Foto Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir di Institut Teknologi dan Bisnis (ITBiS) Lembah Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis (17/3/2022) untuk memberikan kuliah umum di kampus perguruan tinggi tersebut. (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin ketika menerima perwakilan dari organisasi Perkumpulan Pendekar Pencak Silat Indonesia (PPPSI), di Gedung DPD RI, Kamis (17/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan sejumlah senator bersama pimpinan Universitas Pertahanan RI ketika kegiatan FGD bertema 'Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dalam Undang-Undang' di kampus perguruan tinggi milik Kementerian Pertahanan itu, Sentul, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel di sela-sela kegiatan Sidang ke-114 Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali, Minggu (20/3/2022). Foto (Setjen DPD RI)



Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Jumat (18/3/2022) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Foto Setjen DPD RI)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian memperlihatkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja tentang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Rahman Hadi didampingi Deputi Persidangan Sefty Ramsiaty dan Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI Nana Sutisna. (Foto Setjen DPD RI)



Rahman Hadi yang turut didampingi Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Mahyu Darma, dan Kepala Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian Susi Mulyani pada acara orientasi bagi CPNS Setjen DPD RI, Rabu (23/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Kasubag Pemberitaan Biro PHM Budi Fitria (kanan) dan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten Aji Sofyan (tengah) pada rapat konsolidasi dan koordinasi dalam rangka penguatan fungsi publikasi pemberitaan DPD RI, di Kantor DPD RI Provinsi Banten, di Serang, Selasa (8/3/2022). (Foto Setjen DPD RI)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI  
DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

mengucapkan :

**Turut Berdukacita**

atas berpulanginya ke Rahmatullah



**Achmad Hudarni Rani**

Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung

Meninggal, Jumat (8/4/2022) sekitar pukul 16.00 WIB di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bangka Belitung.

*Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Aamiin YRA.*